BAB III
LATAR SEJARAH MUNCULNYA SISTEM POLITIK *SARAKOPAT* DI TANAH GAYO

A. Latar Belakang Internal dan Eksternal

1. Latar Belakang Internal

Disetiap kampung dalam Wilayah Kabupaten Aceh Tengah memiliki lembaga *Sarakopat*nya. Bahkan tiap-tiap Klen,[1] di Tanah Gayo harus ada lembaga *Sarakopat*nya, karena *Sarakopat* adalah suatu lembaga yang diangkat untuk menangani segala sesuatu yang bertalian dengan kepentingan masyarakat itu sendiri, dan lembaga *Sarakopat* berwenang mengatur dan mengurusi segala kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam suatu ikatan adat istiadat, agama dan perundang-undangan pemerintah daerah, baik secara internal maupun secara eksternal.

Dalam pola pelaksanaan kepemimpinan di Tanah Gayo, masyarakatnya menghendaki pemimpinnya berlaku seperti yang tersimpan

---

[1]Masyarakat Gayo mengenal sistem klen (belah). Anggota satu klen adalah kelompok sosial yang merasa keturunan dari satu nenek moyang, masih saling kenal mengenal dan saling berkomunikasi antarsesamanya. Keseluruhan anggota klen itu mendiami sejumlah rumah panjang ***Umah Pitu Ruang*** (Rumah Tujuh Ruang) dalam satu kampung tertentu. Ini juga berarti bahwa dalam satu kampung terdiri dari beberapa klen. Klen yang sama terdapat pula di kampung-kampung lain dan tetap mengamalkan adat ekogami klen. Mereka masih saling kenal mengenal dan sewaktu-waktu terjadi kontak dan komunikasi, misalnya dalam upacara-upacara daur hidup (*life cycle*), baik dalam hubungan dengan siklus hidup (***sinte murip***) maupun yang terkait dengan kematian (***sinte mate***). Lihat M. Junus Melalatoa, "Budaya Malu Sistem Budaya Gayo" dalam *Sistem Budaya Indonesia*, Seri I (Jakarta : Diterbitkan atas kerjasama Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 1997), hlm. 208.

dalam ungkapan adat Gayo "***Ike mah kude kuwan wih, enti bio ari kuduke***", artinya kalau membawa kuda ke dalam air jangan diusir dari belakangnya, tetapi si pembawa kuda itu harus lebih dahulu masuk ke dalam air.[2] Dari ungkapan adat Gayo itu dapat dipahami bahwa para pemimpin harus memberikan contoh terlebih dahulu, barulah masyarakat dapat mengikuti berdasarkan contoh yang ada. Dalam ungkapan adat Gayo yang lain menyatakan bahwa "***Reje kunul teruken remalan termulo,*** " ungkapan itu, diartikan bahwa pemimpin memang duduk di atas tahta, tetapi ia juga harus berjalan atau berdiri paling depan dalam berbagai pekerjaan termasuk dalam menghadapi kesulitan.[3]

Ungkapan adat Gayo di atas, sesuai dengan pola kepemimpinan menurut ajaran tradisional dalam masyarakat Jawa, yang menggambarkan bahwa tugas seorang pemimpin melalui pepatah menyebutkan "***Ing ngarso asung tuladan, Ing madya mangun karsa, tut wuri handayani***".[4] Pepatah tersebut sering dipergunakan oleh almarhum Ki Hajar Dewantara (1889-1959),[5] yang apabila diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia kurang lebih adalah "Di muka memberi tauladan, di

---

[2]M.J. Melalatoa, *Kebudayaan Gayo*, Seri Etnografi Indonesia Nomor 1, (Jakarta : PN. Balai Pustaka, 1982), hlm. 124.

[3]M.J. Melalatoa, *Kebudayaan Gayo, ibid.*, hlm. 124-125.

[4]Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Edisi Baru Kesatu, (Jakarta : CV. Rajawali, 1982), hlm. 289.

[5]Ki Hajar Dewantoro, adalah Pahlawan Pergerakan Nasional dengan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 305 Tahun 1959, tanggal 28 November 1959. Ia dikenal sebagai Pendidikan Nasional dan pendiri Taman Siswa. Beliau wafat pada tanggal 28 April 1959 di Yogyakarta. Lihat *Album Pahlawan Bangsa*, Cetakan ke-15 (Jakarta : Mutiara Sumber Widya, 1998), hlm. 10.

tengah-tengah membangun semangat, dari belakang memberikan pengaruh."[6]

Demikian juga halnya dengan kepemimpinan *Sarakopat* di Tanah Gayo, harus memiliki idealisme kuat di dalam masyarakatnya, sebab ia berada di depan memberi tauladan sesuai dengan adat Gayo di atas. Kepemimpinan *Sarakopat* ditengah-tengah, harus mengikuti kehendak yang dibentuk masyarakat. *Sarakopat* selalu dapat mengamati jalannya masyarakat serta dapat merasakan suka dukanya masyarakat.

Lebih dari itu kepemimpinan *Sarakopat* di belakang diharapkan mempunyai kemampuan untuk mengikuti perkembangan masyarakat. *Sarakopat* berkewajiban untuk menjaga agar supaya perkembangan masyarakat tidak menyimpang dari norma-norma dan nilai-nilai adat-istiadat Gayo yang sesungguhnya. Bahkan kepemimpinan *Sarakopat* yang paling penting adalah untuk menjaga dan memelihara kehormatan adat-istiadat dan budaya Gayo agar tetap orisinal dari para leluhurnya. Itulah salah satu latar belakang internal terbentuknya kepemimpinan *Sarakopat* dalam masyarakat di Tanah Gayo.

Menurut Drs. Tengku H. Mahmud Ibrahim, bahwa istilah "***Sarak***" adalah Wilayah atau Kampung yang wajib dijaga kehormatannya. Maka untuk menjaga kehormatan ***Sarak*** itu perlu pemimpin dan lembaga masyarakat yang bertanggung jawab untuk mengatur dan mengurusi *sarak*

---

[6]Soerjono Soekanto, *Sosiologi, op.cit.*, hlm. 129.

PERPUSTAKAAN IAIN-SU MEDAN

tersebut. Itulah latar belakang internal terbentuknya sistem Politik *Sarakopat* di Tanah Gayo.[7]

Sedangkan menurut A.R. Hakim Aman Pinan, mengatakan bahwa latar belakang munculnya sistem Politik *Sarakopat* secara internal adalah karena masyarakat Gayo tidak bisa terlepas dari adat-istiadat dan budaya mereka sendiri. Mereka hidup bertalian erat dengan masalah adat istiadatnya. Para leluhur pada zamannya, adat itu mereka pergunakan sebagai panutan, pedoman dan undang-undang. Maka untuk menjaga, melindungi, menjalankan, dan menegakkan adat/budaya itu dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat Gayo harus ada suatu lembaga yang bertanggung jawab, yaitu *Sarakopat.*[8]

Penjelasan Aman Pinan di atas, sesuai dengan tulisannya dalam Majalah "*Telangke*", bahwa leluhur pada zamannya, adat itu mereka jadikan sebagai undang-undang walaupun tidak tertulis, dan di Gayo peran adat dipegang oleh *Sarakopat* sebagai Badan yang bertanggung jawab untuk menjaga dan melaksanakan adat/budaya Gayo itu sendiri.[9]

Dalam proses perkembangan adat/budaya Gayo selanjutnya menunjukkan bahwa latar belakang sejarah munculnya sistem Politik

---

[7]Peneliti melakukan wawancara dengan Tengku H. Mahmud Ibrahim, Pimpinan Sekolah Tinggi Islam Gajah Putih Takengon, dan ketua BAZIS Kabupaten Aceh Tengah, tanggal 18 Pebruari 2003 di Takengon.

[8]Peneliti melakukan wawancara dengan A.R. Hakim Aman Pinan, Ketua Lembaga Adat dan Kebudayaan Aceh (LAK) Kabupaten Aceh Tengah tanggal 19 Pebruari 2003 di Takengon.

[9]A.R. Hakim Aman Pinan, "Peranan Adat Gayo Dalam Masa Peralihan", *Majalah Telangke*, Edisi 3 – THN 1/Maret/1996, (Medan : Keluarga Gayo Aceh Tengah (KGAT) Medan, 1996), hlm. 12.

320
SYU
S
C.1
0091TH-02-2005
PERPUSTAKAAN
IAIN-SU
MEDAN

Sarakopat di Tanah Gayo terkait erat dengan penyebab berpisahnya satu Klen (belah) atau keturunan dari satu tempat ketempat yang lain. Menurut C. Snouck Hurgronje, kalau anggota sesuatu belah berkembang, lalu sebagian terpaksa pindah ke tempat lain, berpisah dari belah induknya dan akhirnya ditempat yang baru memilih seorang *reje* (raja) dari kalangannya sendiri.[10] Apabila *reje* (raja) telah dipilih, maka sudah barang tentu raja akan dibantu oleh beberapa kabinetnya, itulah yang disebut dengan *Sarakopat*, yaitu *reje* (raja), *imem* (imam), *petue* (petua), dan *rayat* (rakyat).

Latar belakang yang lain adalah karena terjadi perselisihan atau persaingan,[11] atau oleh karena terjadi ***lape*** (bencana kelaparan), lalu yang merasa sepenanggungan memilih pindah bersama-sama dengan pemimpinnya ke tempat lain. Kalau yang pindah hanya sebagian kecil, kehidupan *saudere* (saudara) tetap dipertahankan, sehingga upaya bantu membantu tetap berlaku. Sebaliknya apabila terjadi yang lebih besar, hubungan *saudere* (saudara) juga tetap dipertahankan sebagaimana

---

[10]Hatta Hasan Aman Asnah, *Gayo, Masyarakat dan Kebudayaan Awal Abad ke 20*, (terj). dari C. Snouck Hurgronje, "Het Gajoland en Zijne Beworners", (Jakarta : Balai Pustaka, Cetakan Pertama, 1996), hlm. 48.

[11]Faktor perselisihan atau persaingan bisa saja terjadi dalam masyarakat Gayo, yang pada akhirnya akan sendirinya terbentuk lembaga *sarakopat*nya, karena dalam suatu kelompok yang berselisih pasti ada yang menang dan kalah. Sudah barang tentu bagi suatu kelompok yang kalah akan hijrah atau pindah ke tempat lain. Disana mereka mengembangkan keturunan, berasimilasi, bersosial, berbudaya yang pada akhirnya di tempat yang baru, mereka bangun kembali masyarakat dan daerahnya, kemudian akan membentuk lembaga *Sarakopat*nya pula. Bentuk perselisihan itu adakalanya perang, permusuhan, sedangkan bentuk persaingan adakalanya di bidang ekonomi, kebudayaan, kedudukan dan perbedaan ras. Lihat Soerjono, *Sosiologi, op.cit.*, hlm. 106.

biasanya. Selanjutnya mereka bisa saja memilih salah seorang di antaranya sebagai seorang pemimpin sekaligus mengakuinya sebagai raja.[12]

Faktor sempitnya lahan di daerah adalah turut mempengaruhi munculnya sistem Politik *Sarakopat*, baik dalam bentuk lahan pertanian, perdagangan, perekonomian, dan lain-lain. Karena lahan yang sempit sudah barang tentu akan mencari lahan yang lebih luas. Menurut C. Snouck Hurgronje bahwa penyebaran penduduk karena sempitnya lahan di daerah asalnya, mula-mula mereka membangun suatu pedusunan yang lama kelamaan akan menjadi sebuah kampung.[13] Kalau kampung sudah ada, maka sudah barang tentu dengan sendirinya menuntut adanya pemimpin, yakni perlu adanya lembaga *Sarakopat* untuk mengatur dan mengurusi kampung serta segala kepentingan masyarakat di daerah yang baru tersebut.

Dari beberapa penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa latar belakang sejarah munculnya sistem Politik *Sarakopat* secara internal menurut versi Drs. Tengku H. Mahmud Ibrahim dan A.R. Hakim Aman Pinan:

a. Untuk menjaga kehormatan *Sarak* (wilayah atau kampung) perlu pemimpin atau lembaga *Sarakopat*
b. Untuk menjaga dan memelihara harkat dan martabat nilai-nilai adat-istiadat / budaya Gayo
c. Karena masyarakat Gayo tidak bisa terlepas dari adat-istiadat/ budaya Gayo, sebab adat itu mereka jadikan sebagai pedoman dan undang-

---

[12]Aman Asnah, *Gayo, op.cit.*, hlm. 48-49.
[13]*Ibid.*

undang, dan yang menjalankan adat/budaya itu adalah *Sarakopat*

d. Sempitnya lahan di daerah asal turut mempengaruhi adanya lembaga *Sarakopat* untuk mengurusi dan mengatur kepentingan masyarakat

e. Timbulnya sistem Politik *Sarakopat* disamping mengatur wilayah atau kampung juga mengatur dan mengurusi ***sinte murip*** dan ***sinte mate***[14] dalam kehidupan masyarakat.

Versi lain mengenai latar belakang sejarah munculnya sistem Politik *Sarakopat* secara internal menurut beberapa orang tokoh adat Gayo Kabupaten Aceh Tengah yang peneliti wawancarai pada tanggal 19, 20 dan 21 Peberuari 2003, seperti Tengku Abdullah (Mude Uyem), Umar Aman Armada, Tengku H. Usman Saleh (Mude Kala) dan ayahanda peneliti Usman Raliby (Aman Maryani), mereka mengatakan bahwa melalui ungkapan turun temurun diketahui munculnya aspirasi pemuka masyarakat Gayo pada zaman dahulu menetapkan empat unsur dalam pemerintahan *Sarakopat* berasal dari empat-empat perkara yaitu:

1. Terdiri dari empat unsur asal usul kejadian manusia yaitu: *Wih* (air), *Tanoh* (Tanah), *Rara* (api), dan *Kuyu* (angin)
2. Meyakini adanya sifat-sifat bagi Allah, yaitu *Nafsiah, Salbiah, Ma'āni* dan *Ma'nawiyah*.

---

[14]Dalam adat Gayo ada lima ***sinte*** (kewajiban) yang mesti dilaksanakan oleh orang tua bersama keluarga intinya. Empat di antaranya disebut "***Sinte murip***" (kewajiban yang berhubungan dengan kehidupan) dan satu "***Sinte mate***" (kewajiban yang berkaitan dengan kematian). Sinte-sinte itu berturut-turut adalah, ***Turun Mani*** (turun mandi), ***Mujelisen*** (Sunat Rasul), Pendidikan, Perkawinan dan Kematian. Hidup berpemerintahan termasuk bahagian dari ***Sinte Murip***. Lihat H. Mahmud Ibrahim (et.al), *Syari'at dan Adat Istiadat*, (Takengon : Yayasan Maqamam Mahmuda, 2002), hlm. 142-238.

3. Meyakini adanya sifat-sifat bagi rasul dan para nabi, yaitu *Shiddiq* (benar), *Amanah* (dipercaya), *Tabligh* (menyampaikan), dan *Fathanah* (bijaksana).
4. Meyakini adanya empat Kitab suci yaitu: Zabur, Taurat, Injil, dan Alquran.
5. Meyakini adanya empat orang sahabat Rasulullah Saw yaitu: Abu Bakar, Umar bin Khattab, Usman bin Affan, 'Ali bin Abi Thalib.
6. Meyakini empat Imam mazhab, yaitu: Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan Imam Hanbali.

Masih banyak lagi empat-empat unsur (anasir empat) yang lain, walaupun secara kebetulan bilangannya empat macam/unsur, namun dasar itulah para pemuka masyarakat *Sarakopat* atau tokoh adat zaman dahulu membuat *Sarakopat* yang terdiri dari empat unsur yaitu: *Reje* (Raja), *Imem* (Imam), *Petue* (Petua), dan *Rayat* (Rakyat). Masih banyak lagi adat Gayo yang lain, seperti empat macam adat, empat kemalun adat, empat menyalahi adat, empat perbuatan *sumang* (sumbang), empat kewajiban terhadap orang meninggal, ada *Bele opat* (empat bala), *Dawa opat* (dewa empat) dan lain-lain. Hal itu akan dikaji dalam bab-bab berikutnya.

2. Latar Belakang Eksternal

Selain latar belakang internal sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, ada juga latar belakang eksternal sejarah munculnya sistem Politik *Sarakopat* di Tanah Gayo. Kalau secara internal muncul dari dalam masyarakat Gayo sendiri menuntut adanya lembaga *Sarakopat*, sedangkan

latar belakang eksternal adalah muncul dari luar masyarakat Gayo sendiri, yaitu adanya pengaruh atau hubungan dengan daerah lain.

Secara politis, menurut C. Snouck Hurgronje bahwa Gayo satu politik dengan Aceh,[15] tampak jelas pada waktu pecahnya perang Aceh, sebagaimana berlaku dalam daerah-daerah Aceh, juga di Tanah Gayo, mereka berperan aktif menyisihkan zakat dan bagian fisabilillah untuk biaya perang Aceh, padinya dijual dan uangnya diserahkan kepada utusan Sultan.

Terkadang masih dijalankan juga pengumpulan uang khusus bagi tujuan suci tersebut.[16] Karena orang Gayo mengerti arti bantuan bagi dana perang sampai-sampai yang miskinpun sekalipun berusaha menyedekahkan hartanya demi kepentingan perang. Untuk mengatur dan mengumpulkan dana perang tersebut, tentu tidak semua orang Gayo terlibat di dalamnya, tidak mungkin seluruh orang Gayo berwenang mengumpulkannya, hanya sebagian saja orang Gayo bertugas untuk itu, yakni para petugas di bawah perintah *reje* (raja) atau lembaga *Sarakopat*.

Apalagi dalam hubungan politik antara Gayo dan Aceh, khususnya daerah Perlak[17] sangat erat, hal itu disebabkan karena suku Gayo dengan

---

[15]Aman Asnah, *Gayo, op.cit.*, hlm. 72.

[16]Budiman S., *Tanah Gayo dan Penduduknya*, (terj) C. Snouck Hurgronje, "Het Gajoland ez Zijne Beworners" (Jakarta : Indonesia-Netherland Cooperation In Islamic Studies (INIS), 1996), hlm. 87.

[17]Menurut catatan perjalanan Cina, Arab, Persia, Hindustan, Italia, Portugis dan lain-lain, di antaranya catatan Marcopolo dari Italia tahun 1203 menyatakan bahwa Perlak adalah negeri tertua di Sumatera. Sementara kata "Perlak" diambil dari nama pohon yang banyak tumbuh di sana yang digunakan untuk perahu. Sebelum abad ke XIII, Negeri Perlak dipimpin oleh raja yang dalam tradisi disebut "***Meurah***" berasal dari kata "***Morhat***" yang artinya raja. Lihat H. Mahmud Ibrahim, *Mujahid Dataran Tinggi Gayo*, (Takengon : Yayasan Maqamam Mahmuda, 2001), hlm. 19.

suku Aceh hidup bersama dalam wilayah provinsi Aceh saat ini dikenal Nanggroe Aceh Darussalam. Maka untuk membina hubungan baik antara Gayo dengan Aceh tentu peranan *Sarakopat* sangat menentukan. Jika *Sarakopat* di Tanah Gayo tidak ada bagaimana politis, perdagangan, ekonomi, pertanian, dan lain-lain dapat terjalin. Sebaliknya dengan adanya sistem Politik *Sarakopat*, hubungan antar keduanya berjalan secara harmonis. Inilah latar belakang sejarah munculnya sistem Politik *Sarakopat* secara eksternal.

Bahkan hubungan politik suku Gayo bukan hanya dalam negeri saja yaitu Aceh dan Perlak, melainkan sampai ke luar negeri pada waktu itu (416 H/1025 M) yaitu ke negeri Johor Malaysia atau Kerajaan Johor Malaysia. Hubungan itu bukan hanya dalam bidang politik, ekonomi dan perdagangan tetapi juga hubungan perkawinan. Hal itu dapat dibuktikan bahwa sejak Adi Genali, [18] memerintah di negeri Lingga pada tahun 1025 M hidup rakyat semakin makmur, kemudian membentuk *Sarakopat* dan mendirikan kerajaan-kerajaan kecil di daerah *Seurule*, *Semarkilang* dan pinggiran Danau Laut tawar dan Gayo luas.[19] Raja Adi Genali ini menyunting seorang putri dari Kerajaan Johor Malaysia, dan mempunyai 4 orang anak, Johansyah, Joharsyah, Meurah Linge dan Jampuk Linge.[20]

---

[18]Adi Genali karena kacakapannya ia diangkat menjadi Raja Islam Linge ke IV yang berkedudukan di Buntul "*Linge*" pada tahun 1025 M yang dilantik oleh Syeh Syirajuddin Abbas dari Kerajaan Islam Perlak. Lihat H. A.R. Latief, *Pelangi Kehidupan Gayo dan Alas*, (Bandung : Kurnia Bupa, 1995), hlm. 47.

[19]H. A.R. Latief, *ibid.*, hlm. 67.

[20]*Ibid.*

Drs. Tengku H. Mahmud Ibrahim, mengatakan bahwa adanya hubungan antara suku Gayo dengan Kerajaan Negeri Johor Malaysia merupakan salah satu latar belakang eksternal munculnya sistem Politik *Sarakopat* di Tanah Gayo, karena menjalin hubungan itu tentu dengan *Sarakopat*, tidak mungkin kerajaan luar atau daerah lain menghubungi rakyat satu persatu, sementara di daerah yang dihubungi itu ada kekuasaan atau pemerintah *Sarakopat*. Jadi secara eksternal muculnya sistem Politik *Sarakopat* di Tanah Gayo adalah mengembangkan budaya Gayo dan dapat berkomunikasi dengan dunia luar.[21]

B. Gayo dan *Sarakopat* Dalam Lintasan Sejarah

Adanya keragaman versi tentang sejarah masyarakat Gayo, membuat para peneliti semakin sulit menentukan data yang paling benar, terkadang ada sebagian versi tidak bisa diterima secara rasional; dan ilmiah, bahkan tidak dapat teruji kebenarannya di dunia empiris. Walaupun demikian berikut ini akan dijelaskan secara singkat mengenai asal-usul masyarakat Gayo dan lembaga *Sarakopat*nya mulai dari zaman Pra-Islam sampai pada zaman reformasi sekarang ini menurut berbagai versi.

1. Zaman Pra-Islam (sekitar 617 SM)

Menurut versi yang ditulis oleh Tim Peneliti dan Penulis Monografi Kabupaten Aceh Tengah dari Universitas Syiah Kuala Darussalam Banda

---

[21]Peneliti melakukan wawancara dengan Tengku H. Mahmud Ibrahim, tanggal 18 Pebruari 2003, *op.cit.*.

Aceh tahun 1970 menulis bahwa suku bangsa Gayo berasal dari Melayu Tua yang datang ke Sumatera gelombang pertama dan menetap di pantai Timur Aceh dengan pusat pemukiman di wilayah antara muara aliran sungai Jambu Aye, sungai Perlak dan sungai Temiang. Kemudian menyusur aliran sungai-sungai itu berkembang ke Serbejadi, Lingga dan Gayo Lues.[22]

Versi yang ditulis oleh Drs. Tengku H. Mahmud Ibrahim menjelaskan bahwa penduduk Perlak adalah penduduk yang tertua berasal dari Melayu tua. Penduduk yang tertua itu pindah ke Sumamah, kemudian ke Serbejadi, Lingga, Nosar dan Isaq melalui sungai Penarun. Kepala negaranya disebut "*reje*" (raja) dan jabatan di bawahnya disebut "***Kejurun***" dan "***Penghulu***".[23] Orang Gayo berada di pedalaman bukan karena takut masuk Islam sebagaimana *mytos* yang dikaitkan dengan bahasa Aceh "*Kaiyo*" (sudah takut) yang dianggap asal kata yang menjadi nama suku Gayo. Sebab orang Gayo sudah berada di Pantai Timur Aceh sampai ke Gayo Sumamah, Gayo Lues dan Gayo Deret, sejak sebelum Masehi atau jauh sebelum Islam yang didakwahkan Rasulullah Muhammad saw. sampai di Perlak yang merupakan wilayah pertama masuknya Islam di Nusantara. Mereka menyebar kepedalaman melalui tiga daerah aliran sungai besar

---

[22]Tim Peneliti dan Penulis Monografi Kabupaten Aceh Tingkat II Aceh Tengah, (Banda Aceh : Fakultas Ekonomi Universitas Syiah Kuala Darussalam, 1970), hlm. 10, dalam Mahmud Ibrahim, *Mujahid, op.cit.*, hlm. 1.

[23]Mahmud Ibrahim, *ibid.*, hlm. 2.

yaitu Sungai Jambo Aye (***Kala Jemer***), Sungai Perlak dan Sungai Tamiang.[24]

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Drs. Tengku H. Mahmud Ibrahim,[25] pada tanggal 13 pebruari 2003 di Takengon mengatakan bahwa semenjak orang Gayo ada di Aceh Tengah sekitar tahun 617 SM, sudah memiliki adat-istiadat. Mereka pertama sekali berdiam di Perlak Pantai Timur Aceh dan Pase, kemudian menyusuri aliran Sungai Jambu Aye langsung ke *Samarkilang, Serule, Linge (Isaq)* kemudian ke Takengon di lembah Sungai Danau Laut Tawar.[26]

Setelah bangsa Melayu datang gelombang kedua, Melayu tua yang sudah mendiami Indonesia sebagian mengalami assimilasi dan sebagian mendiami wilayah Aceh Tengah (Gayo Lut dan Gayo darat), sebagian Aceh Tenggara (Gayo Lues) dan sebagai wilayah Aceh Timur (Gayo Sumamah atau Serbejadi dan Gayo Kalul).[27] Wilayah-wilayah tersebut masih didiami oleh suku Gayo sampai sekarang.

---

[24] *Ibid.*

[25] Tengku H. Mahmud Ibrahim dilahirkan di Mesir Bebesen Aceh Tengah tanggal 29 Juli 1929. Beliau adalah pimpinan Yayasan dan Dosen Perguruan Tinggi Gajah Putih Takengon, juga sebagai Ketua BAZIS (Badan Amil Zakat, Infaq, Shadaqah) Kabupaten Aceh Tengah, tahun 1986 salah seorang pemimpin Majelis Ulama Kabupaten Aceh Tengah. Maka sudah barang tentu kualitas keilmuannya dapat dikatakan ilmiah, baik di bidang sejarah Gayo, adat istiadat Gayo, maupun dalam bidang pendidikan dan keagamaan, hal itu terbukti beliau adalah ulama Kabupaten Aceh Tengah yang sangat produktif dalam menulis buku, makalah dan lain-lain.

[26] Wawancara dengan Tengku H. Mahmud Ibrahim, *op.cit.*

[27] H. Mahmud Ibrahim, "Peranan Islam Melalui Adat Gayo Dalam Pembangunan Masyarakat Gayo", *Makalah Seminar Ilmu Pengetahuan dan Kebudayaan*, tanggal 20-25 Januari 1986 (Takengon : Majelis Ulama Indonesia bekerjasama dengan MUI Aceh Tengah, 1986), hlm. 1.

yaitu Sungai Jambo Aye (***Kala Jemer***), Sungai Perlak dan Sungai Tamiang.[24]

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Drs. Tengku H. Mahmud Ibrahim,[25] pada tanggal 13 pebruari 2003 di Takengon mengatakan bahwa semenjak orang Gayo ada di Aceh Tengah sekitar tahun 617 SM, sudah memiliki adat-istiadat. Mereka pertama sekali berdiam di Perlak Pantai Timur Aceh dan Pase, kemudian menyusuri aliran Sungai Jambu Aye langsung ke *Samarkilang, Serule, Linge (Isaq)* kemudian ke Takengon di lembah Sungai Danau Laut Tawar.[26]

Setelah bangsa Melayu datang gelombang kedua, Melayu tua yang sudah mendiami Indonesia sebagian mengalami assimilasi dan sebagian mendiami wilayah Aceh Tengah (Gayo Lut dan Gayo darat), sebagian Aceh Tenggara (Gayo Lues) dan sebagai wilayah Aceh Timur (Gayo Sumamah atau Serbejadi dan Gayo Kalul).[27] Wilayah-wilayah tersebut masih didiami oleh suku Gayo sampai sekarang.

---

[24] *Ibid.*

[25] Tengku H. Mahmud Ibrahim dilahirkan di Mesir Bebesen Aceh Tengah tanggal 29 Juli 1929. Beliau adalah pimpinan Yayasan dan Dosen Perguruan Tinggi Gajah Putih Takengon, juga sebagai Ketua BAZIS (Badan Amil Zakat, Infaq, Shadaqah) Kabupaten Aceh Tengah, tahun 1986 salah seorang pemimpin Majelis Ulama Kabupaten Aceh Tengah. Maka sudah barang tentu kualitas keilmuannya dapat dikatakan ilmiah, baik di bidang sejarah Gayo, adat istiadat Gayo, maupun dalam bidang pendidikan dan keagamaan, hal itu terbukti beliau adalah ulama Kabupaten Aceh Tengah yang sangat produktif dalam menulis buku, makalah dan lain-lain.

[26] Wawancara dengan Tengku H. Mahmud Ibrahim, *op.cit.*

[27] H. Mahmud Ibrahim, "Peranan Islam Melalui Adat Gayo Dalam Pembangunan Masyarakat Gayo", *Makalah Seminar Ilmu Pengetahuan dan Kebudayaan*, tanggal 20-25 Januari 1986 (Takengon : Majelis Ulama Indonesia bekerjasama dengan MUI Aceh Tengah, 1986), hlm. 1.

Ada beberapa pendapat mengenai asal usul dan makna kata "*Gayo*" yaitu:

Orang-orang Karo yang sebagian berasal dari Linge menemui lubuk ikan di wilayah Blangkejeren, disana terdapat banyak sekali kepiting. Lantas mereka menyebut dan mempopulerkan nama wilayah dengan "*Gayo*" yang berarti "kepiting".[28] Mereka menurut pemberitahuan orang Gayo yang tahu akan daerah Batak Karo, disana sebaliknya terdapat juga Linggo Munthe dan Cebero sebagaimana marga. Tempat tinggal suku Batak Karo menyebabkan emigrasi dari sana ke Tanah Gayo lebih banyak diterima daripada dari daerah batak lainnya. Orang Gayo yakni saudara-saudara mereka yang berasal usul Batak, datang dari Tanah Gayo.[29] Oleh karena itu C. Snouck Hurgronje mengatakan bahwa susunan kekerabatan orang gayo ada yang bersamaan dengan Batak.[30]

Pendapat lain mengatakan bahwa "Gayo berasal dari kata "*gaya*" karena dialek setempat berobah menjadi "*Gayo*". Dalam hikayat raja-raja Pasai disebutkan bahwa Gayo sebagai orang Samudera yang tidak mau memeluk agama Islam kemudian melarikan diri ke Hulu Sungai Peusangan. Karena itu dikatakan "*Kaiyo*" dalam bahasa Aceh berarti "takut". Kemudian berubah menjadi "*Gayo*".[31] Keterangan semacam itu kata C. Snouck Hurgronje kurang mempunyai arti untuk menentukan

---

[28]Zam-zam Putih, "Perasaan Masuknya Agama Islam di Gayo", 1980, dalam *Makalah* H. Mahmud Ibrahim, *ibid.*, hlm. 2.

[29]Rehngena Purba, "Kajian Historis (Antropologis) Masyarakat Gayo, Alas dan Singkil", *Makalah* (Medan : Garuda Plaza Hotel, 2001, hlm. 2.

[30]Aman Asnah, Gayo, op.cit., hlm. 42.

[31]Syahbuddin Razi, dalam *Makalah* H. Mahmud Ibrahim, *op.cit.*, hlm. 2.

nama-nama dari penduduk yang asal-usulnya sama sekali masih kabur, yang jelas bahwa orang Gayo itu ketika masih animistis sudah Gayo namanya. Jadi bukanlah timbul sesudah orang Batak diislamkan.[32]

Ada lagi versi lain yang mengatakan bahwa Geniri menghubungkan dengan nama "***dagroian***" dari Marco Polo dan ia berpendapat bahwa kata itu singkatan dari "***Drang-Gayo***" yang dengan awal "***da***" berarti orang Gayo. Melahan Geniri mengatakan ***Nadur (Nagor)*** dalam berita-berita Tionghoa adalah negeri Gayo.[33]

Menurut pendapat turun temurun kata "**Gayo**" berasal dari "***Garib***" atau "***Gaib***", karena yang mula-mula pemimpin orang Gayo ke Linge tidak kelihatan jasadnya, kecuali suaranya saja yang dapat didengar. "Suaranya dalam bahasa Gayo disebut "***Lengnge***" kemudian berubah menjadi "***Linge***", itulah asal nama daerah Kerajaan Linge di Aceh Tengah.[34]

Versi yang ditulis M.J. Melalatoa dalam bukunya "*Kebudayaan Gayo*" menulis ada legenda yang mengatakan bahwa orang Gayo pertama berasal dari "*negeri rum*". Orang itu adalah seorang laki-laki yang bernama Genali, terdampar ke sebuah pulau kecil yang disebut pulau *Buntul Linge.*[35] Pulau kecil yang dimaksud adalah pulau Sumatera sendiri, yang ketika itu keadaannya belum sebesar sekarang ini, kemudian ia nikah dengan seorang putri dari Kerajaan Johor Malaysia. Putri Johor membawa

---

[32]Aman Asnah, *Gayo*, *op.cit.*, hlm. 45.

[33]H. Zainuddin, *Tarekh Aceh dan Nusantara*, dalam H. Mahmud Ibrahim, *op.cit.*, hlm. 2.

[34]H. Mahmud Ibrahim, *ibid.*, hlm. 2

[35]M.J. Melalatoa, *Kebudayaan Gayo*, *op.cit.*, hlm. 36.

penginang dan pengasuhnya, sehingga mulai saat itu berkembanglah penduduk pulau kecil tadi, dimana sebagai raja pertamanya adalah Genali sendiri. Sementara pulau kecil tadi semakin lama semakin lebar.[36] Namun M.J. Melalatoa tidak menyebutkan kapan berdirinya Kerajaan Linge tersebut serta keturunannya. Sebab hal itupun banyak versi yang berbeda,beda. Ada yang mengatakan sebelum Islam, dan ada yang mengatakan setelah Islam datang ke daerah Linge tersebut.

Menurut versi yang ditulis oleh H.A.R. Latief bahwa Kerajaan Linge tersebut ada setelah Islam datang. Termasuk versi yang ditulis oleh Drs. Tengku H. Mahmud Ibrahim, menulis bahwa pada tahun 181 H atau 808 M., Ahmad Syarief dinobatkan menjadi Sultan Kerajaan Islam Lingga pertama, kemudian Meurah Ishaqsyah (375 H- 986M) menjadi Raja Linge ke II ketika serangan Sriwijaya pada tahun 986 Masehi hijrah ke Linge-Isaq. Meurah Ishaqsyah mempunyai putra bernama Meurah Mersa. Kemudian Meurah Mersa mempunyai 7 orang anak, salah seorang putranya bernama Meurah Jernang yang kemudian menjadi Raja Linge ke III, selanjutnya Meurah Jernang mempunyai seorang putra bernama Adi Genali, karena kecakapannya ia diangkat menjadi Raja Linge ke IV yang berkedudukan di Buntul "*Linge*" pada tahun 1025 M yang dilantik oleh Syekh Syirajuddin Abbas dari Kerajaan Islam Peurlak.[37]

---

[36] *Ibid.*

[37] H.AR. Latief, *Pelangi, op.cit.*, hlm. 47, H. Mahmud Ibrahim, *Mujtahid, op.cit.*, hlm. 18.

Versi yang ditulis oleh Prof. A. Hasjmy bahwa agama Islam masuk ke daerah Linge melalui Peurlak. Kerajaan Islam Linge (daerah Aceh Tengah sekarang) berdiri pada tahun 416 H (1925 M) dengan pangkat "Adi Genali menjadi rajanya yang pertama.[38] Kelihatannya versi yang ditulis oleh Prof. A. Hasjmy ini berbeda dengan versi yang ditulis oleh H. AR Latief di atas, dimana Adi Genali sebagai Raja Linge ke IV, sedangkan Prof A. Hasjmy sebagai *Reje* Linge I.[39]

Sedangkan versi lain menurut menulis bahwa Kerajaan Linge tersebut ada sebelum Islam datang (Pra-Islam) sebagaimana versi yang ditulis oleh M.J. Melalatoa sendiri dalam bukunya "*Kebudayaan Gayo*" bahwa pada masa sebelum datang Islam ke Aceh, konon sudah ada suatu kerajaan di daerah Gayo sekarang bernama Kerajaan Linge. Namun kapankah kerajaan ini mula pertama berdirinya, kiranya tidak ada suatu keterangan yang pasti.[40] Yang jelas M.J. Melalatoa membahas Kerajaan Linge ini pada sejarah zaman purba, dan kalau dianalisis tulisannya mengenai asal usul orang Gayo dari negeri Rum sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, hal itu menunjukkan bahwa Kerajaan Linge telah ada sebelum Islam.

Kemudian versi yang ditulis A.R. Hakim Aman Pinan dalam bukunya "*Asal Linge Awal Serule*' menunjukkan bahwa Kerajaan Linge ada

---

[38]Hasjmy, "Sejarah Masuk dan Berkembangnya Islam di Aceh dan Nusantara", *Makalah* dalam Abdurrahim Ali, *Perenanan Islam Melalui Adat Gayo Dalam Pembangunan Masyarakat Gayo*, (Takengon : 1986), hlm. 1.

[39]*Ibid.*

[40]M.J. Melalatoa, *Kebudayaan, op.cit.*, hlm. 38.

pada Pra-Islam, kendatipun A.R. Hakim Aman Pinan tidak menyebutkan demikian, namun yang jelas yang dimaksud Genali disini adalah Genali pada zaman ***Roh Beldem***,[41] atau penguasa sebelum adanya *Reje* Linge I.[42] Genali adalah sebentuk pangkat gelar Anumerta. Jelasnya tidak sama dengan Genali yang tertera dalam "*Silsilah Asal Usul Keturunan Sultan Peureulak dan Linge Gayo*". Maksudnya lewat silsilah di atas adalah Meurah Isaq ke Meurah Mersa, Meurah Mersa ke Meurah Jernang turun ke Adi Genali.[43]

Menurut peneliti, setelah menganalisa beberapa versi di atas yang saling kontroversial mengambil jalan studi komperatif, bahwa pemimpin Kerajaan Linge di Tanah Gayo Isaq ada dua orang bergelar Anumerta "Genali". Yang pertama bernama "Genali" sudah ada pada zaman Pra-Islam Islam datang ke Linge, sesuai dengan versi yang ditulis oleh M.J. Melalatoa, dan A.R. Hakim Aman Pinan. Yang kedua "Adi Genali" sebagai *Reje* Linge I atau ke IV, ada setelah Islam datang ke daerah Linge sekitar tahun 416 H (1025 M), sesuai dengan versi H. A.R. Latif dan Prof. A. Hasjmy.

Ada beberapa alasan peneliti mengatakan bahwa Raja Linge I bernama Genali sudah ada pada zaman Pra-Islam. **Pertama**, dalam

---

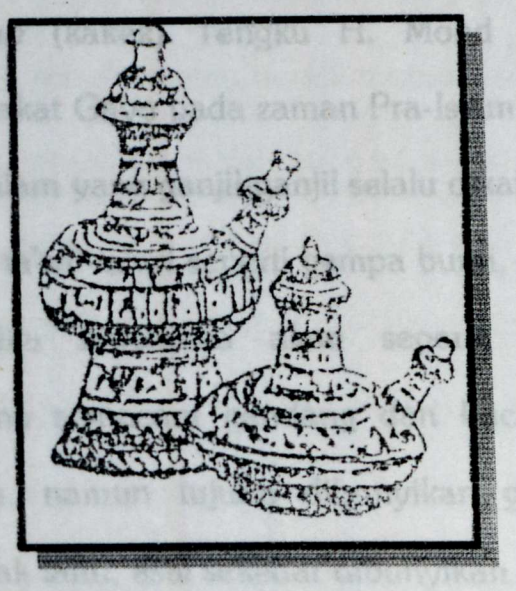
[41] ***Roh Beldem***, yang dimaksudkan barangkali adalah suatu kepercayaan animistis yang berkembang dalam masyarakat Gayo pada waktu itu, dimana makhluk-makhluk halus atau roh-roh yang ada di sekitar manusia, baik di hutan-hutan, di ladang, di kebun, di air, di pepohonan, di gunung-gunung, di rumah-rumah, di jalan-jalan, maupun di istana Kerajaan Linge.

[42] A.R. Hakim Aman Pinan, *Asal Linge Awal Serule*, (Takengon : Diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah, 2002), hlm. 14.

[43] *Ibid.*

sejarah manusia ada dikenal dengan istilah zaman ***Neolithikum***, yaitu zaman *batu baru* atau sezaman dengan masa bercocok tanam, dimana salah satu cirinya pada zaman tersebut ialah telah dikembangkan kepandaian membuat Tembikar. Di Gayo sendiri telah dikembangkan kepandaian membuat tembikar yang berbentuk bermacam-macam wadah, seperti Kendi (*Keni*), *Labu* (sejenis kendi dengan ukuran yang lebih kecil), tempat menyimpan air (*Buyung*) tempat yang menyerupai Baskom (*Buke*), periuk, dan lain-lain. Kegiatan secaman itu tentu dilakukan oleh banyak orang, dan orang banyak itu pasti ada yang memimpinnya yaitu *Reje* (raja). *Reje* (raja) yang melindungi, mengatur dan mengurusi mereka, yaitu *Reje* Genali.

GAMBAR 2



KENDI (*KENI*) GAYO

Alasan **kedua**, tingkat kepercayaan orang Gayo ketika itu masih animistis, yaitu suatu bentuk kepercayaan adanya hubugnan antara manusia sendiri dengan roh-roh yang dianggap memiliki, menguasai, atau

kekuatan yang ada dimana-mana memenuhi alam semesta ini. Karenanya A.R. Hakim Aman Pinan menyebut Kerajaan Linge dengan zaman *Roh Beldem* di bawah kekuasaaan Raja Genali. Kepercayaan animistis itu masih tetap berpengaruh sampai Islam datang ke daerah Linge sekitar tahun (375 H-986 M).

Salah satu ciri-ciri Gayo menganut kepercayaan animistis ketika itu, dan menjadi adat kebiasaan mereka pada zaman Pra-Islam adalah:

1. Menjaga kuburan orang yang baru meninggal selama beberapa hari dan membuat makanan untuk dimakan bersama disana.
2. Kalau ada orang yang meninggal ditangisi beramai-ramai sambil meratap.
3. Mengadakan *kenduri* di kuburan orang-orang yang dianggap keramat.[44]

Menurut *Awan* (kakek) Tengku H. Mohd Ali Djadun, bahwa kepercayaan masyarakat Gayo pada zaman Pra-Islam menganggap seluruh kejadian fenomena alam yang ganjil-ganjil selalu dikaitkan dengan tahayul, khurafat, bid'ah dan ta'wil-ta'wil seperti gempa bumi, gerhana bulan, banjir dan lain-lain. Ketika fenomena alam seperti itu terjadi, mereka membunyikan rebana semacam gendang dan bacaan-bacaaan tertentu atau mantra-mantra, namun tujuan dibunyikan gendang dan bacaan mantera tersebut tidak tahu, asal sekedar dibunyikan dan dibaca saja.[45]

---

[44]Abdurrahim Ali, *Peranan., op.cit.*, hlm. 5-6.

[45]Peneliti melakukan wawancara dengan *Awan* (Kakek) Tengku H. Mohd. Ali Djadun, Ketua MPU (Mejelis Permusyawaratan Ulama) Kabupaten Aceh Tengah tanggal 15 Pebruari 2003 di Takengon.

Selain itu, untuk menentukan kehidupan masa depan, banyak orang percaya kepada yang gaib, tukang tenun, dukun, ahli nujum, tukang ramal dan lain-lain. Dalam bidang ekonomi mereka percaya kepada animisme dan dinamisme, yaitu segala sesuatu mempunyai kekuatan. Pohon kayu besar, batu besar, dan segala macam tumbuh-tumbuhan dicakapi, misalnya padi, waktu menanam bibit sampai memanennyapun dicakapi. Bahkan dalam bahasa Gayonya "***Niro tabi***" (mohon izin atau maaf) bila melakukan panen padi agar tidak terkejut dan disakiti padinya.[46]

Bentuk-bentuk penyembahan atau upacara ritual keagamaan masyarakat Gayo pada zaman animisme Pra-Islam menurut *Ama* (ayahanda) Usman Raliby adalah menyembah jin atau roh-roh para datuk yang telah meninggal dunia. Dalam bahasa Gayonya disebut "***Gegayang***" yaitu memelihara roh-roh datu atau nenek moyang serta jin-jin, kemudian dipuja dengan cara membuat makanan dari empat unsur beras "***Oros Opat***" (beras empat) yaitu warna ***item*** (hitam) ***putih, ilang*** (merah) , dan ***kuning***. Keempat warna beras tersebut diberikan kepada roh-roh dan jin-jin peliharaan, agar tidak mengganggu kehidupan masyarakat.[47]

Sedangkan sistem pemerintahan di Tanah Gayo pada zaman Pra-Islam belum dikenal dengan istilah "*Sarakopat*", sistem politik yang dikenal

---

[46]Wawancara dengan *Awan* (Kakek) Tengku H. Mohd. Ali Djadun, *ibid.*

[47]Peneliti melakukan wawancara dengan *Ama* (Ayahanda) Usman Raliby, salah seorang Tokoh Adat Gayo atau *petue* (petua) di desa Kala Lengkio Kebayakan tanggal 15 Pebruari 2003 di Takengon.

adalah "***Sarak Tulu***" (tiga unsur dalam satu kesatuan" yaitu *Reje* (raja), *petue* (petua), dan *rayat* (rakyat). Sedangkan *Imem* (imam) baru ada setelah Islam datang. Barulah disebut dengan *Sarakopat.*[48]

Sistem pemerintahan "***Sarak Tulu***" pada zaman Pra-Islam di Tanah Gayo itulah yang berlaku. Merekalah yang mengatur dan mengurusi segala kepentingan masyarakat Gayo pada waktu itu, tidak ada pemerintahan lain. Urusan pemerintahan dalam bidang pengaturan yang baik dan adil diserahkan kepada *Reje* (raja) yang melindungi dan bertanggung jawab kepada rakyat. Urusan pemerintahan dalam bidang upacara ritual keagamaan dinamistis diserahkan kepada orang tua (*petua*) dan urusan menjalankan demokrasi diserahkan kepada *pegawe* (rakyat).

Sistem pelaksanaan pemerintahakan ***Sarak Tulu*** bersifat hukum adat, namun adat istiadat mereka dahulu masih sangat tercela. Kebiasaan mereka sehari-hari adalah menghisap candu, judi, menyabung ayam, bahkan perbuatan membunuh (***mutube***) atau meracuni orang adalah perbuatan lumrah bagi mereka, perbuatan mencuri justru menjadi kebiasaan, dan menjadi *Reje* (raja) tergantung kepada yang kuat. Siapa yang kuat merekalah yang berkuasa, dan yang lemah selalu menjadi budak para penguasa pada saat itu. Itulah namanya zaman Pra-Islam yang dikenal dengan zaman jahiliyah.

---

[48]Wawancra dengan Tengku H. Mahmud Ibrahim, *op.cit.*

2. Zaman Islam (173H/800 M)

Ketika agama Islam masuk ke Tanah Gayo sekitar tahun 173 H atau tahun 800 M.[49] Adat/budaya masyarakat Gayo pada zaman Pra-Islam yang bersifat animistis masih tetap ada, bahkan perbuatan tercela seperti menghisap candu, mencuri, berjudi, menyabung ayam, guna-guna semacam ilmu santet dan lain-lain masih dilakukan oleh sebahagian masyarakat Gayo. Bahkan upacara keagamaan seperti memelihara roh-roh para datu moyang, jin, syetan, menjaga dan memuja kuburan yang dianggap keramat masih tetap ada dalam sebahagian masyarakat Gayo. Namun berkat atas rahmat Allah Swt diiringi dengan perjuangan dakwah Islamiyah oleh para mubaligh Islam yang datang ke negeri Tanah Gayo, ajaran agama Islam dan aqidah masyarakat menjadi mantap, maka segala perbuatan tercela, dosa, syirik, khurafat dan tahayul dapat dihilangkan sedikit demi sedikit dalam diri masyarakat Gayo.

Kehadiran ajaran Islam ke Tanah Gayo, diterima dengan senang hati oleh masyarakat Gayo, sebab budaya lokal didaerah ini dapat disesuaikan dengan ajaran tawḥīd dan kebudayaan Islam, hal itu sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Prof. Dr H Ridwan Lubis, bahwa penyebaran Islam

---

[49]Ketika sebuah angkatan dakwah Islamiyah berjumlah 100 orang yang terdiri dari orang-orang Arab, Persia dan India dipimpin oleh Nakhoda Syahir Nuwi dari Teluk Kambey Gujarat berlabuh di Teluk Perlak pada tahun 173 H atau 800 M, orang-orang Gayo membaur dengan mereka dalam proses pemerintahan dan kemasyarakatan, diikat oleh tali persaudaraan Islam. Pada waktu itu semua orang Gayo masuk Islam yang sebelumnya menganut animisme. Lihat H. Mahmud Ibrahim, *Mujahid, op.cit.*, hlm. 18. Berdasarkan keterangan itu peneliti berpendapat bahwa pada tahun itulah Islam menyebar ke Tanah Gayo.

keberbagai belahan bumi, sepanjang ia sebagai ajaran semuanya berlangsung dalam bentuk "*penetration pacifique*" atau lebih lazim disebut dengan penyusupan secara damai.[50]

Apabila dirujuk pada pendekatan konsep Islam, sesuai dengan yang dirumuskan pada seminar sejarah masuknya Islam ke Indonesia pada bulan maret 1963, maka Islam telah masuk ke Indonesia pada abad I hijrah. Sungguhpun demikian harus diakui bahwa pengertian konsep Islam datang belum berarti Islam telah berkembang dan menjadi pola anutan masyarakat secara luas.[51] Islam baru menjadi pola anutan masyarakat, khususnya masyarakat Gayo setelah membentuk berbagai institusi sosial pada periode berikutnya. Bahkan lebih dari itu, oleh karena upaya pelaksanaan ajaran Islam (*tanfīż al-syāri'āt*) menimbulkan berbagai implikasi terhadap terbentuknya struktur politik, maka adalah suatu konsekuensi logis bahwa perkembangan Islam menuju kepada yang lebih nyata lagi yaitu dengan berdirinya pusat-pusat kekuasaan Islam seperti berbagai kerajaan dan kesultanan di nusantara ini, termasuk berbagai Kerajaan Aceh dan Tanah Gayo.

Khusus di Tanah Gayo ada empat Kerajaan Islam yang amat besar pengaruhnya hingga saat sekarang ini, bahkan menjadi objek studi

---

[50]M. Ridwan Lubis, *Perspektif Pembaharuan Pemikiran Islam*, (Medan : Pustaka Widya Sarana, 1992), hlm. i.

[51]Menurut Taufiq Abdullah timbulnya polemik yang berkepanjangan tentang kapan masuknya Islam ke Indonesia, karena tidak jelasnya konsep yang digunakan antara "Islam datang", "Islam berkembang" dan "Islam menjadi kekuatan politik". Selanjutnya lihat Taufiq Abdullah (ed.) *Agama Etos Kerja dan Perkembangan Ekonomi*, (Jakarta : LP3ES, 1979), hlm. 1.

penelitian ilmiah bagi mereka yang ingin meneliti sistem politik atau pemerintahan di Tanah Gayo. Keempat kerajaan tersebut ialah Kerajaan Linge, Kerajaan Bukit, Kerajaan Cik Bebesen dan Kerajaan Syiah Utama. Keempat kerajaan tersebut yang memegang adat-istiadat/budaya Gayo, sehingga adat/budaya Gayo dapat teraplikasi dengan ajaran Islam dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat Gayo.

a. Kerajaan Linge (181 H / 800 M)

Pada kajian terdahulu telah dibahas sekilas tentang Kerajaan Linge pada zaman Pra-Islam dengan rajanya yang pertama adalah Genali. Sedangkan kerajaannya disebut dengan Kerajaan ***Roh Beldem***, kemudian berubah menjadi Kerajaan Linge. Perubahan tersebut terjadi karena mula-mula pemimpin orang Gayo ke Linge tidak kelihatan jasadnya, kecuali suaranya saja yang dapat didengar. "**Suaranya**" dalam bahasa Gayo disebut "***Lengnge***", kemudian berubah menjadi "***Linge***", itulah asal nama daerah Kerajaan Linge. Sedangkan istilah Genali berasal dari "***kenali***", secara harpiah sama dengan "**carilah**". Yang dimaksud dengan carilah adalah cari ***Lengnge*** (suaranya).[52]

Setelah Islam datang ke Tanah Gayo, maka pada tahun 181 H atau 808 M, Ahmad Syarif dinobatkan menjadi Sultan Kerajaan Islam Lingga pertama.[53] Masyarakat diwilayah ini menempuh kehidupan baru secara

---

[52]A.R. Hakim Aman Pinan, *Asal Linge, op.cit.*, hlm. 13.

[53]H. Mahmud Ibrahim, *Mujahid, op.cit.*, hlm. 18. Lihat juga H. AR. Latif, *Pelangi, op.cit.*, hlm. 65.

tertib dan tenteram, karena diikat oleh dasar agama dan adat istiadat secara terpadu. Akan tetapi Ahmad Syarif tidak lama menjadi Sultan atau raja di Linge, karena permaisurinya meminta kepada raja untuk menjenguk ayahnya yang sedang menderita sakit di Kerajaan Negeri Johor Malasysia. Ahmad Syarif dengan permaisurinya berangkat ke negeri Johor Malaysia, kemudian menetap disana, dan tidak lagi kembali ke negeri Linge, sejak kepergiannya pemerintahan di Negeri Linge kurang berpungsi lagi.[54]

Dalam situasi kekosongan kepemimpinan Kerajaan Linge tersebut, maka muncul anggota *Sarakopat* memegang pucuk pemerintahan Kerajaan Linge yang ditinggalkan oleh Sultan Ahmad Syarief. Disaat seperti itulah *Sarakopat* mulai berperan aktif melaksanakan musyawarah untuk mengganti Raja Linge I. Dalam suasana proses pemilihan, Kerajaan Peurlak diserang kerajaan pasukan Sriwijaya pada tahun 986 Masehi. Meurah Ishaqsyah putra dari Sultan Maliksyah dari kerajaan Peurlak Hijrah ke daerah Linge Isaq. Kemudian beliau dinobatkan menjadi Raja Linge ke II. Dari sinilah ada namanya daerah Isaq di Takengon, sesuai dengan namanya Meurah Ishaqsyah.

Meurah Ishaqsyah mempunyai putra bernama Meurah Mersa,[55]

---

[54]H. AR. Latief, *Pelangi, op.cit.*, hlm. 66.

[55]Putra Meurah Ishaqsyah satu-satunya bernama Meurah Mersa, mengembangkan ajaran Islam dan membangun masyarakat di Takengon. Menurut cerita turun-temurun di Takengon Meurah Mersa di sebut "*Datu Peski*" yang bermakam di *bur nibebuli* dekat Kampung Kebayakan, sementara menurut orang-orang tua di Takengon, Makam Muyang Meurah Mersa di bagian belakang rumah Jabatan Controler Belanda, sekarang dikenal dengan Bale Samsu (Rumah Jabatan Bupati Aceh Tengah). Di dekat makam itu tumbuh sebuah pohon kayu besar (*Kayu Kul*) yang sering dijiarahi orang, kenduri atau melepas nazar. Selanjutnya lihat H. Mahmud Ibrahim, *Mujahid, op.cit.*, hlm. 20. Versi lain mengatakan bahwa yang disebut "*Datu Peski*" adalah anak dari Meurah Mersa yang bernama *Meurah Mege* yang mengembangkan Islam dan lahan pertanian di Kebayakan, setelah ia meninggal dunia dikuburkan di atas *Burni Bebuli* digelar *Datu Peski*. Selanjutnya lihat H. AR. Latief, *Pelangi*, hlm. 66.

disaat Kerajaan Linge di bawah pimpinan Meurah Ishaqsyah mengalami kemajuan dan perkembangan, karena pada saat ini wilayah kekuasaan Kerajaan Linge bertambah luas. Eksvansi yang dilakukan oleh Meurah Ishaqsyah adalah dengan memerintahkan putranya Meurah Mersa untuk mengembangkan ajaran Islam, adat istiadat/budaya Gayo, dan membuka lahan pertanian sampai ke daerah pinggiran Danau Laut Tawar di Takengon dengan beberapa orang penduduk. Kemudian mengembangkan dakwah Islamiyah ke wilayah Blang Mersa sekaligus juga membuka lahan pertanian. Itulah sebabnya daerah ini dinamai Blang Mersa hingga saat ini.

Dalam sejarah Kerajaan Linge diketahui bahwa Meurah Mersa mempunyai 7 orang anak yaitu, Meurah Mege, Meurah Pupuk, Meurah Malik Ibrahim, Meurah Putih, Meurah Hitam, Meurah Bacang dan Meurah Jernang.[56] Meurah Jernang cucu dari Meurah Ishaqsyah inilah kemudian menjadi Raja Linge ke III setelah kakeknya tersebut meninggal. Kemudian setelah Meurah Jernang meninggal Kerajaan Linge dipimpin oleh putranya bernama Adi Genali sebagai Raja Linge ke IV.

Sejak Adi Genali memerintah kerajaan di negeri Linge Tanah Gayo pada tahun 416 H atau 1025 M, hidup rakyat semakin makmur, aman dan damai. Pada saat itu Adi Genali telah membentuk kabinet pemerintahan *Sarakopat*nya dengan teliti dan bijaksana, adil dalam memimpin rakyat, bahkan ia mendirikan kerajaan-kerajaan kecil di daerah Serule,

---

[56]H. AR. Latief, *Pelangi*, *op.cit.*, hlm. 53.

Semarkilang Pinggiran Danau Laut Tawar dan Gayo Lues.

Raja Adi Genali ini menyunting seorang putri dari kerajaan Johor Malaysia, dan mempunyai 4 orang anak, yaitu Johansyah, Joharsyah, Meurah Lingga dan Jampuk Linge.[57] Sumber lain Adi Genali mempunyai empat orang anak, seorang putri bernama Datu Beru dan tiga orang putra, masing-masing bernama Sibayak Lingga, Johansyah dan Meurah Lingga.[58]

Putra Adi Genali yang bernama Sibayak Lingga pergi merantau ke dataran tinggi pegunungan Sibayak dan mengembangkan Islam di tanah Karo dan Aru. Sedangkan Johansyah memegang pucuk pimpinan di negeri Linge, menggantikan ayahnya Adi Genali. Namun kemudian Johansyah menjadi Sultan Pertama Kerajaan Aceh Darussalam dengan gelar Sultan Alaiddin Johansyah (601-633 H).

Pada masa kepemimpinan Johansyah di Kerajaan Negeri Linge, beliau memerintah dengan adil dan bijaksana, sehingga ketatalaksanaan pemerintahan berjalan tertib dan teratur. Kemudian ia juga mendirikan raja-raja kecil tunduk di bawah Kerajaan Linge seperti Gayo Lues ditunjuk Peutue Aman, di Lukup Serbajadi ditunjuk Abuek, disamping itu ditentukan pula kekuasaan *Sipitu* (tujuh) Johor dan *Sipitu* (tujuh) Aceh dan dari *Silapan* (delapan) Johor dan *Silapan* (delapan) Aceh yaitu:

1. Cik Serule Lanang Berjeje ditempatkan di negeri Serule, wilayah kekuasaannya di daerah sekitar Danau Laut Tawar

---

[57] *Ibid.*, hlm. 67.
[58] H. Mahmud Ibrahim, *Mujahid*, *op.cit.*, hlm. 22.

2. Cik Lumut Jana Putra ditempatkan di Lumut untuk memimpin negeri Gelung Perajah
3. Cik Kuala Mamang Terune, ditempatkan di Penarun untuk memimpin di Penarun
4. Penghulu Linge, Bunge Lede, ditempatkan di Delung untuk memimpin daerah Tali Waihni Dudun
5. Cik Gele Ali Muhammad, ditempatkan di Belang Kejeren daerah Sitiresagi.
6. Cik Rema ditempatkan di Rema Belang Kejeren
7. Cik Pepang ditempatkan di Pepang untuk memimpin daerah Kampung Pertik.

Sedangkan untuk *Sipitu* (si tujuh) Aceh Raja Linge memberikan kekuasaan antara lain:

1. *Reje* Bukit, ditempatkan di Belang Kejeren (Kampung Bukit)
2. Cik Kute Lintang, ditempatkan di Belang Kejeren (Kampung Kute Lintang)
3. Cik Porang, mata Temor Ulu Tembege, ditempatkan di Porang untuk memimpin Kampung Porang
4. Cik Perga yang ditempatkan di Samar Kilang
5. *Kejurun* Bintang ditempatkan di Nalun
6. Penghulu Kadi yang ditempatkan di Samar Kilang
7. Raja Kelana, Suluh Terang ditempatkan di Rikit

2. Karna Besi, ditempatkan di Temiang untuk menjaga kali Temiang sebelah kanan, agar negeri Temiang aman, yang bernama *Kejurun* Karang.

Sedangkan silsilah-silsilah Kerajaan Linge ini dapat dilihat pada tabel berikut ini:

TABEL 2.1 SILSILAH-SILSILAH KERAJAAN LINGE

No	KERAJAAN	NO. URUT	NAMA RAJA
01	*Reje* Linge	Ke I	Ahmad Syarief
02	*Reje* Linge	Ke II	Meurah Ishaqsyah
03	*Reje* Linge	Ke III	Meurah Jernang
04	*Reje* Linge	Ke IV	Adi Genali
05	*Reje* Linge	Ke V	Johansyah
06	*Reje* Linge	Ke VI	Bujang Lano
07	*Reje* Linge	Ke VII	Kejurun Jagong
08	*Reje* Linge	Ke VIII	Uyub
09	*Reje* Linge	Ke IX	Hud
10	*Reje* Linge	Ke X	Mahmud
11	*Reje* Linge	Ke XI	M. Saleh
12	*Reje* Linge	Ke XII	Lhut
13	*Reje* Linge	Ke XIII	Bukit
14	*Reje* Linge	Ke XIV	Alisyah
15	*Reje* Linge	Ke XV	Aman Nyak
16	*Reje* Linge	Ke XVI	Cut
17	*Reje* Linge	Ke XVII	Sasa
18	*Reje* Linge	Ke XVIII	Abdul Muthalib

SUMBER; H. AR. Latief, Pelangi Kehidupan, Gayo dan Alas

b. Kerajaan Bukit (± 1580 M)

Kerajaan Bukit Berdiri pada abad XV berkedudukan di atas sebuah bukit yang datar, jauhnya 2 kilometer dari kota Takengon, sekarang dinamai dengan Kampung Bebesen. Rajanya yang pertama bernama

"Sengeda" (w. 1610 M).[59] Menurut versi John R. Bowen dalam bukunya "*Sumatran Politics and Poetis, Gayo History 1900-1989*' bahwa pendiri Kerajaan Bukit adalah "*Saeda*" *The founder of Bukit, Saeda (Sengeda in other versions), came into being in the Villange of Serule.*[60] Pendiri Kerajaan Bukit adalah bernama Saeda (Sengeda dalam versi yang lain), datang dari Kampung Serule.

> Selanjutnya John R. Bowen, juga mengatakan bahwa "*the Sultan of Aceh Showed favor on Saeda, named him ruler of bukit, and gave him five royal daggers.*[61] *Saeda married two momen from Aceh. The first bore him two sons who became lesser rulers in Bukit. The second brought two sons with her: Menet, who became the of Edge Bukit, and Mpus Kolaq, who was the first person in the gunung line. She then bore him two sons: Merah Lama and Panglima Perang Dagang.*[62]

Kalimat di atas, dapat dipahami bahwa Sultan Aceh memperhatikan kecakapan Saeda dalam memimpin Kerajaan Bukit, dia diberikan lima kerajaan yang besar. Saeda menyunting dua orang gadis dari Aceh. Isteri pertama mempunyai dua orang anak, yang kemudian menjadi urusan pemerintahan di Bukit. Isteri kedua membawa dua orang anak, Menet yang kemudian menjadi *Reje* di Bukit, dan Mpus Kolaq sebagai raja Gunung. Dua orang anak dari isterinya yang pertama adalah Merah Lama dan Panglima Perang Dagang.

---

[59]H. AR. Latief, *Pelangi, op.cit.*, hlm. 79.

[60]John R. Bowen, *Sumatran Politics and Poetics, Gayo History, 1900-1989*, (New Haven and London : Yale Univesity Press, 1991), hlm. 82.

[61]*Ibid.*, hlm. 83.

[62]*Ibid.*

Dalam sumber yang lain dijelaskan bahwa Sengeda ini menyunting Janda yang bernama Cut Meurah Ati Putri T. Cik Ahmad dari kerajaan Meureudu Aceh Pidie, yang mempunyai dua orang putra yaitu Empus Kolak dan Panglima Perang Dagang. Sebelum ia menikah *Reje* Sangeda berjanji kepada isterinya kedua dan anak tirinya, kelak akan dijadikan *Reje* di daerah Bukit. Beberapa tahun kemudian dan hasil perkawinannya lahirlah seorang puta diberi nama Menet.[63] Beberapa tahun kemudian Panglima Perang Dagang diangkat menjadi Raja Bukit "***Lah***" dan Menet diangkat menjadi Raja Bukit "***Iwih***". Tetapi raja-raja kecil ini tunduk di bawah kekuasaan Raja Bukit "Sangeda".

Pada waktu itu, wilayah lingkungan kekuasaan raja-raja kecil, ruang lingkungannya masih terbatas, penduduknya masih sedikit, sedangkan wilayah sangat luas, sehingga terjadi pembauran di antara mereka, maka terdapatlah belah-belah (clan) di bawah pimpinan seorang penghulu dan wakil atau *Bedel* Raja Bukit. Kendatipun mereka berbaur antara satu belah dengan belah yang lainnya, penduduknya saling asuh dan asih, setiap problema yang terjadi diselesaikan dengan jalan musyawarah lembaga *Sarakopat*. Pada waktu itu tidak ada satu permasalahanpun yang tidak dapat diselesaikan oleh *Sarakopat*, *Sarakopat* benar-benar berfungsi menjalankan amanah yang diberikan oleh Allah swt. demi kepentingan rakyat.

---

[63]H. AR. Latief, *op.cit.*, hlm. 80.

Segala persoalan rakyat, baik berupa pelanggaran, penyimpangan, perkelahian, perbuatan yang melanggar *Sumang* (sumbang) dapat diselesaikan oleh *Sarakopat*, berdasarkan syariat Islam dan adat istiadat Gayo. Pada masa Kerajaan Bukit ini dalam Kampung Kebayakan terdapat Belah-Belah adalah sebagai berikut: (1) Belah bukit Lah, (2) Belah Bukit Iwih, (3) Belah Gunung, (4) Belah Penghulu Brukhsyah, (5) Belah Kala atau Kuala, (6) Belah Penghulu Mude , (7) Belah Penghulu Jalil, (8) Belah Gading, (9) Belah Cik, (10) Belah Penghulu Sagi, (11) Belah Meulem, (12) Belah Bujang, (13) Belah Timangan, (14) Belah Batin, (15) Belah Serule, (16) Belah Lot, (17) Belah Asir-Asir, (18) Belah one-one, (19) Belah Demun, (20) Belah Kenawat, (21) Belah Angkup, (22) Belah Toweren, (23) Belah Rawe, (24) Belah Bewang, (25) Belah Bintang, (26) Belah Dedamar, (27) Belah Meuye, (28) Belah Kelitu, (29) Belah Telong, (30) Belah Genting Samin, (31) Belah Keloang, (32) Belah Tembolon, (33) Belah Badak, (34) Belah Kute Lintang, (35) Belah Rosep, (36) Belah Tunyang, (37) Belah Jalong, dan lain-lain.

Sedangkan Silsilah-Silsilah Kerajaan Bukit ini dapat dilihat dalam tabel berikut ini

TABEL 2.2 SILSILAH-SILSILAH KERAJAAN BUKIT

NO	NAMA KERAJAAN	NO. URUT	NAMA RAJA
01	Raja Bukit	Ke I	Sangeda
02	Raja Bukit	Ke II	Panglima Perang Dagang
03	Raja Bukit	Ke III	Menet
04	Raja Bukit	Ke IV	Empun Raja
05	Raja Bukit	Ke V	Empun Bar
06	Raja Bukit	Ke VI	Empun Tinggi
07	Raja Bukit	Ke VII	Tengku Pakeh
08	Raja Bukit	Ke VIII	Mamat
09	Raja Bukit	Ke IX	Aman Husein Bintara
10	Raja Bukit	Ke X	Kadir
11	Raja Bukit	Ke XI	Ma'mun
12	Raja Bukit	Ke XII	Raja Ilang
13	Raja Bukit	Ke XIII	Zainuddin

SUMBER: H. AR Latief, Pelangi Kehidupan Gayo dan Alas

Demikian juga silsilah-silsilah raja-raja kecil yang tunduk di bawah kekuasaan Raja Bukit seperti Raja Gunung, Raja Bukit Lah dan Raja Bukit Iwih dapat dilihat dalam tabel berikut:

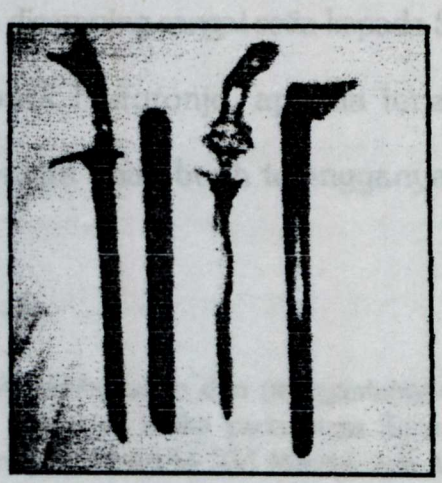
TABEL 2.3.SILSILAH RAJA-RAJA KECIL YANG TUNDUK DI BAWAH KERAJAAN BUKIT

NO	RAJA GUNUNG	RAJA BUKIT LAH	RAJA BUKIT IWIH
01	Raja Empu Kolak	Panglima Perang Dagang	Raja Menet
02	Panglima Keleton	Empun Bal	Empun *Reje*
03	Empun Bertih	Datuk Dio	Empun Bar
04	T. Garut	Sabah Empun Tri	Empun Tinggi
05	T. Zainal	Mamat	T. Pakeh
06	T. Johan	Ma'mun	Kadir
07	R. Wahab	Zainuddin	Kasah

SUMBER: H. AR LATIEF, PELANGI KEHIDUPAM GAYO DAN ALAS

Menurut versi yang disampaikan oleh putra raja Wahab yang bernama Syarifuddin bahwa setelah raja Sangeda mangkat, untuk menghindari peperangan satu daerah keturunan, maka Sultan Aceh menetapkan bahwa Raja Gunung, Raja Bukit Lah, dan Raja Bukit Iwih, sebagai raja otonom atau yang berdiri sendiri, tunduk langsung di bawah Kerajaan Aceh Darussalam dan masing-masing mendapat Bawar dari Sultan.

GAMBAR 3



BAWAR RAJA BUKIT DAN RAJA SYIAH UTAMA

c. Kerajaan Cik Bebesen (± 1607 M)

Kerajaan Cik Bebesen berdiri pada abad ke XVI yang berkedudukan di Kampung Bebesen semasa Sultan Aceh Iskandar Muda memerintah, tahun 1607-1636 dari hasil kemenangan Batak Karo (Batak 27) dalam peperangan melawan Kerajaan Bukit, yang berakhir dengan kesepakatan membayar diyat atas tewasnya

enam orang Batak Karo yang dibunuh dan digantung oleh penduduk Bukit.[64]

Raja pertama yang memerintah Kerajaan Cik Bebesen bernama "Leubeau Kader" (1564-1642) [65] berasal dari Batu Bulan Fak-Fak Dairy Sumatera Utara yang berketurunan masih berdarah Buntul Linge Sibayak "Belige Raja Batak Fak-Fak Dairy Sumatera Utara".[66] Raja Cik Bebesen telah disyahkan oleh Sultan Aceh dengan syarat bahwa kedudukannya bukan sebagai kerajaan Tradisional di Tanah Gayo dan mendapat perlambang kerajaan berupa sebuah Rencong Aceh, karena raja ini sangat baik hubungannya dengan raja-raja tetangga disamping sangat setia kepada Sultan Aceh.

Menurut C. Snouck Hurgronje, apabila terjadi pertengkaran antara anak buah *Reje* Cik dengan anak buah tetangganya yaitu *Reje* Bukit, maka

---

[64]Terjadinya peristiwa pembunuhan dan penggantungan terhadap enam orang Batak Karo oleh penduduk Bukit, bermuara ketika pada masa Sultan Alaudin Riyatsyah Al-Kahar memerintah Aceh Darussalam pada abad ke XVI Masehi, ada tujuh pemuda dari Tanah Karo bertamasya ke Tanah Gayo menyaksikan kebenaran keindahan Danau Laut Tawar yang tersiar kemana-mana yang mereka sangka Danau itu terletak di atas sebuah gunung yang tinggi. Ketika mereka sampai ke danau hari sudah gelap (malam) lalu mereka tidur di sebuh gubuk tua (*penyangkulan depik*) di pinggir danau. Keesokan harinya mereka berjalan sampai ke kampung Bukit, dan melihat orang bermain judi. Oleh pemuda Karo ikut bermain, namun selalu kalah oleh penduduk setempat. Tetapi berkat keuletan bermain mereka kemudian berhasil menang sampai Bandar Judi gulung tikar di daerah ini. Dari sinilah muncul perkelahian hingga terjadi pembunuhan oleh rakyat Bukit terhadap Batak Karo. Maka oleh Raja Karo yang dipimpin oleh Leubeau Kader untuk mengadakan perundingan dengan raja Bukit dengan membayar diyat satu orang Batak terbunuh dengan 25 orang Bukit menjadi Budak di Karo. Rajat Bukit keberatan atas permintaan itu, Raja Bukit setuju membagi sebahagian wilayahnya kepada Batak 27 itu, dan Leubeau Kader menjadi rajanya. Lihat H. AR. Latief, *Pelangi, op.cit.*, hlm. 81-90.

[65]Raja Leubeu Kader sebelum masuk Islam ia memeluk agama Berbigu, Permalim dan mempercayai roh-roh halus nenek moyang (animisme). Nama kecilnya adalah "Talpan" setelah ia mengucapkan kalimat syahadat dengan salah seorang ulama besar di Pengajian Kuala Lawet Aceh Barat, namanya diganti menjadi Leube Kader. Lihat H. AR. Latief, *Pelangi, ibid.*, hlm. 83 dan 103.

[66]H. AR. Latief, *Pelangi, ibid.*m, hlm. 102-103.

pihak *Reje* Bukit sering melontarkan kata-kata "*Batak due puluh tujuh*".[67] Ejekan-ejekan ini tidak akan melemahkan semangat pihak *Reje* Cik, tetapi malah sebaliknya membangkitkan rasa solidaritas yang tinggi di kalangan mereka. Dari sekian banyak republik-republik kecil di seantero Tanah Gayo, tidak terdapat jalinan kekeluargaan yang begitu intim dan kuat, seperti yang ada pada anak buah Cik Bebesen.[68]

Adanya rasa solidaritas yang tinggi di antara rakyat *Reje* Cik Bebesen tersebut karena di ikat oleh agama dan adat istiadat. Peranan lembaga *Sarakopat* dalam menjalin rasa kesatuan dan persatuan di antara anak buah *Reje* Cik sangat tinggi. Adat dan agama benar-benar terlaksana dalam kehidupan mereka, kerena *Sarakopat*nya sangat bertanggung jawab dalam memimpin, mengatur dan mengurusi kepentingan rakyat. Hal ini dapat dibuktikan bahwa *Reje* Cik memiliki penduduk inti yang homogin, hanya terdiri dari 27 keluarga dan sangat sedikit mengalami pembauran.

Bahkan pada masa pemerintahan *Reje* Cik Bebesen pertama dalam segi perkawinan, *Reje* Cik cenderung sangat tidak suka dan mencegah untuk mengambil orang luar, kecuali dari keenam suku yang ada,[69] ikatan kekeluargaan dibina begitu erat walaupun sudah berjauhan. Kalau ada orang dari Kampung *Ketol, Wihni Duren* atau dari *Berukhsyah* umpamanya

---

[67]Aman Asnah, *Gayo, op.cit.*, hlm. 108.

[68] *Ibid.*

[69]Ada 6 belah (klen) yang berada di bawah kekuasaan *Reje* Cik Bebesen yaitu, Belah Cebero, Belah Melala, Belah Tebe, Belah Linge, Belah Munte dan Belah Kemili. Lihat Aman Asnah, *Gayo*, , *ibid.*, hlm. 111-112.

hendak pergi ke Kampung Bebesen, mereka selalu berkata "***male ulak ku umah***" (mau pulang ke rumah). Demikian juga halnya dengan rakyat *Reje* Bukit, apabila hendak pergi ke Kampung Kebayakan dari manapun asalnya, mereka berkata "***male beluh ku umah***" (mau pergi kerumah) maksudnya ke Kampung Kebayakan.

Demikian peraturan adat istiadat yang berlaku pada masa itu di dua kerajaan di Tanah Gayo, yaitu *Reje* Bukit dan *Reje* Cik Bebesen. Apalagi ada seorang pemuda, misalnya dari *Reje* Cik Bebesen datang ke kampung kekuasaan *Reje* Bukit dengan maksud menyunting atau mengganggu anak gadis kampung *Reje* Bukit, kalau tidak sopan atau tidak baik caranya, akan dapat mengalami perselisihan bahkan perkelahian dengan anak-anak muda di Kampung *Reje* Bukit. Demikian sebaliknya apabila anak muda *Reje* Bukit hendak menyunting atau mengganggu anak gadis kampung *Reje* Cik Bebesen kalau tidak sopan akan mengalami perkelahian bahkan terjadi peperangan yang berakhir dengan kematian. Begitulah fungsi adat yang diterapkan oleh *Sarakopat* pada saat itu. Namun sekarang unsur asing telah mulai merasuk ke tubuh mereka, adat perkawinanpun tidak lagi begitu ketat dijalankan selama walinya masih terikat darah keturunan.

Dalam upaya mengatur dan mengurusi kepentingan rakyat, maka lembaga *Sarakopat* mulai melaksanakan musyawarah kabinet untuk menyusun personil Kerajaan Cik Bebesen. Hasil musyawarah tersebut ditentukan beberapa orang personil sebagai berikut:

- Raja Cik Bebesen : Leubeu Kader
- Penasehat/peramal kerajaan : Teungku Bur Ni Jangkar
- Juru Tulis : Teungku Salah Nama
- Penerangan : Teungku Bur Ni Jangkar
- Panglima kerajaan : Teungku Gempar Alam

Sedangkan penghulu-penghulu adalah:

- Penghulu Linge : Teungku Biah
- Penghulu Meulala : Teungku Empun Meulala
- Penghulu Tebe : Teungku Empun Toba
- Penghulu Munthe : Teungku Empun Jangkar
- Penghulu Cibro : Petue Delem

Demikian sekilas tentang sejarah berdirinya Kerajaan Cik Bebesen. Untuk mengetahui silsilah-silsilah Kerajaan Cik Bebesen ini dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

TABEL 2.4: SILSILAH KERAJAAN KERAJAAN CIK BEBESEN

NO	NAMA KERAJAAN	NO. URUT	NAMA RAJA
1	2	3	4
01	Raja Cik Bebesen	Ke I	Leubeu Kader
02	Raja Cik Bebesen	Ke II	Datuk Cekok
03	Raja Cik Bebesen	Ke III	Pang Dorop
04	Raja Cik Bebesen	Ke IV	Empun Sabah
05	Raja Cik Bebesen	Ke V	Sawa Renem
06	Raja Cik Bebesen	Ke VI	Empun Joga
07	Raja Cik Bebesen	Ke VII	Empun Umur

1	2	3	4
08	Raja Cik Bebesen	Ke VIII	Teungku Mayak
09	Raja Cik Bebesen	Ke IX	Empun Juni
10	Raja Cik Bebesen	Ke X	Genap Alias Raja Bujang
11	Raja Cik Bebesen	Ke XI	Syah Bandar alias Batak
12	Raja Cik Bebesen	Ke XII	A. Daud Alias Raja Ucak
13	Raja Cik Bebesen	Ke XIII	Muhammad Alias raja Uyem
14	Raja Cik Bebesen	Ke XIV	Ranta

SUMBER: H.AR LATIEF, *Pelangi Kehidupan Gayo dan Alas*

d. Kerajaan Syiah Utama (± 1580 M)

Kerajaan Syiah Utama berdiri pada abad ke XV terletak dipinggiran Danau Laut Tawar Ujung Bale dengan ujung Peningon Kampung Nosar, 19 Km. ke arah Timur kota Takengon. Raja pertama yang memimpin Kerajaan Syiah Utama ini adalah Munyang Setie (w. 1626 M) yang berasal dari Arab Persi.[70]

Menurut C. Snouck Hurgronje dahulu Kerajaan Syiah Utama memang memerintah di daerah Danau Laut Tawar, namun dalam suasana peperangan melawan salah seorang *kejurun* tetangganya sendiri, dia meminta bantuan kepada pihak ketiga yaitu Raja Perupi dari Tanah Gayo. Sebagai imbalan membalas budi baik ini *Kejurun* Syiah Utama merelakan menyerahkan daerahnya di daerah Danau kepada Raja Perupi, akan tetapi *Kejurun* Syiah Utama sendiri berangkat bersama anak buahnya menuju

---

[70]H. AR. Latief, *Pelangi, op.cit.*, hlm. 118.

Serbejadi. Raja Perupi itu disebut Syiah Utama dan *Kejurun* Syiah Utama sendiri dipanggil *Kejurun* Abok.[71]

Kerajaan Syiah Utama ini terkenal sebagai kerajaan yang sangat setia kepada Sultan Aceh, sehingga oleh Sultan Aceh menganugerahkan sebuah "*Bawar*". Atas dasar itu pula raja pertama Syiah Utama ini dijuluki "Munyang Setie". Setelah raja pertama ini meninggal, kedudukannya digantikan oleh putra Mahkota Empun Ibrahim yang menjadi raja ke II. Namun dalam perkembangan selanjutnya daerah Kerajaan Syiah Utama secara perlahan sedikit demi sedikit diambil oleh Raja Bukit lewat peperangan dan tendensi politik.

Akibat tendensi politik yang dilakukan oleh Raja Bukit menyebabkan keluarga Syiah Utama yang semula hidup rukun dan selalu bersamaan menjadi terpencar-pencar, ada yang masih di Pinggir Danau Laut Tawar, sebagian pindah ke Samar Kilang, Gayo Lues dan Lukup Serbajadi.[72] Namun perlu dicatat bahwa Raja Syiah Utama ini sangat terkenal alim dan bijaksana.

Setelah Indonesia merdeka tahun 1945, daerah Kerajaan Syiah Utama ini mula-mula ditetapkan sebagai Kecamatan, kemudian ditetapkan menjadi pemukiman, tunduk di bawah Kecamatan Bukit, kemudian ditetapkan tunduk di bawah Kecamatan Bintang. Namun setelah adanya pemekaran Kabupaten Aceh Tengah pada tahun 2000 di bawah

---

[71]Aman Asnah, Gayo, op.cit., hlm. 135.
[72]H. AR. Latief, *Pelangi, op.cit.*, hlm. 119.

kepemimpinan Bupati Drs Tengku H. Mustafa M. Tamy, MM, nama Kerajaan Syiah Utama ditetapkan menjadi nama Kecamatan Syiah Utama dengan ibukotanya Rusip, berdasarkan peraturan daerah Kabupaten Aceh Tengah Nomor 6 tahun 2000.[73]

Walaupun keturunan Kerajaan Syiah Utama ini telah terpencar-pencar, namun perjuangan mereka dalam menegakkan ajaran agama Islam dan adat/budaya Gayo harus tetap dikenang, apalagi mengingat jasa Raja Syiah Utama yang sering tampil menjadi penengah apabila terjadi persengketaan di antara kerajaan tetangga yang sulit dipecahkan, sehingga atas dasar itu pula Kerajaan Syiah Utama sangat disegani oleh *Kejurun-Kejurun* yang berada di Tanah Gayo.[74] Dengan kata lain, disamping ia sebagai kepala pemerintahan juga sebagai kepala agama Islam di Tanah Gayo, yaitu sebagai *imem* (imam), bahkan dapat dikatakan sebagai *petue* (petua) yang dapat menyelesaikan persengketaan dan mengurusi kepentingan rakyat di Tanah Gayo. Jadi unsur kepemimpinan *Sarakopat* ada dalam dirinya.

Belah-belah yang ada di lingkungan Kerajaan Syiah Utama ini antara lain adalah Belah Syiah Utama, Belah *Imem Bale* (Takengon), *Belah Penghulu Bino* (*Penaron Isak*), dan *Belah Akim* (*Dedamar*). Waktu itu kejadian *Belah-Belah* (*Klen-Klen*) tersebut merupakan suatu tradisi suku

---

[73]Aceh Tengah Dalam Angka 2000, (Takengon : Kerjasama Bappeda dan Badan Statistik Kabupaten Aceh Tengah, 2000), hlm. viii.

[74]H. AR. Latief, *Pelangi, op.cit.*, hlm. 123.

Gayo yang apabila mereka berpindah dari daerah asalnya ke daerah lain, maka Belah yang mereka sandang selalu di bawa untuk dipergunakan, agar tradisi *Belah* mereka tidak hilang. Namun sekarang ini yang namanya *Marga* atau *Belah-Belah* tersebut sudah jarang dipergunakan, hal ini barangkali masyarakat Gayo cepat sekali menerima perobahan, sehingga hampir semua orang Gayo tidak memiliki Marga.

Adapun Silsilah-Silsilah Kerajaan Syiah Utama ini adalah sebagai berikut:

TABEL 2.5 SILSILAH-SILSILAH KERAJAAN SYIAH UTAMA

NO	NAMA KERAJAAN	NO. URUT	NAMA RAJA
01	Raja Syiah Utama	Ke I	Munyang Setie
02	Raja Syiah Utama	Ke II	Empun Berahim
03	Raja Syiah Utama	Ke III	Raham
04	Raja Syiah Utama	Ke IV	Gamat
05	Raja Syiah Utama	Ke V	Merah
06	Raja Syiah Utama	Ke VI	Amal
07	Raja Syiah Utama	Ke VII	Jalal
08	Raja Syiah Utama	Ke VIII	Laham
09	Raja Syiah Utama	Ke IX	Bitel
10	Raja Syiah Utama	Ke X	Banta Cut

SUMBER: H.AR. LATIEF. PELANGI KEHIDUPAN GAYO DAN ALAS

Demikian 4 Kerajaan Islam yang telah berdiri di Tanah Gayo sebagai konsekwensi logis bahwa Islam dan adat istiadat Gayo telah berkembang kepada yang lebih nyata dalam berbagai aspek kehidupan

masyarakat Gayo di wilayah Kabupaten Aceh Tengah.

Menurut *Awan* (Kakek) Tengku H. Mohd. Ali Djadun, bahwa berdirinya 4 Kerajaan Islam di atas, menunjukkan Islam dan adat Gayo telah terlaksana dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat Gayo, karena para raja itulah yang memegang adat istiadat sebagai penunjang ajaran agama Islam.[75] Demikian juga halnya dengan penjelasan Tengku. H. Mahmud Ibrahim mengatakan, bahwa zaman Islam mulai masuk daerah Aceh Tengah *Sarakopat* merupakan satu-satunya bentuk pemerintahan, tidak ada pemerintahan lain yang menjalankan adat istiadat dan agama dalam kehidupan masyarakat Gayo.[76] Karena pada prinsipnya keterpaduan antara nilai dan norma agama Islam dan adat istiadat, yang ditetapkan sejak berdirinya Kerajaan Linge Isaq pada tahun 376 H, atau 989 M. serta Kerajaan Islam lainnya, tetap merupakan keyakinan masyarakat pendukungnya untuk dapat mewujudkan keteraturan, ketertiban, ketenteraman, keamanan, kesejahteraan dan kebahagiaan.[77]

3. Zaman Penjajahan Belanda (1901-1942)

Gayo Aceh Tengah dijajah oleh Belanda selama 41 tahun (1901-1942).[78] Selama itu, lembaga *Sarakopat* kurang sinergetik dalam mengatur dan mengurusi kepentingan masyarakat, karena kekuasaan sepenuhnya berada di tangan penjajahan kolonial Belanda.

---

[75]Wawancara dengan *Awan* (Kakek) Tengku H. Mohd. Ali Djadun, *op.cit.*.
[76]Wawancara dengan Tengku H. Mahmud Ibrahim, *op.cit.*
[77]H. Mahmud Ibrahim, (et.al), *Syari'at*, *op.cit.*, hlm. 2.
[78]H. Mahmud Ibrahim, *Mujtahid*, *op.cit.*, hlm. 77.

Walalupun demikian, masyarakat Gayo yang kuat keimanan dan pengamalan ibadahnya, menganggap ajaran Islam dan adat mereka sebagai alat pemersatu bagi mereka. Hal itu diakui oleh Belanda sendiri, misalnya C. Snouck Hurgronje, mengatakan bahwa orang-orang Islam di negeri ini pada waktu itu menganggap agama mereka sebagai alat pengikat yang kuat yang membedakan mereka dari orang-orang yang bukan Islam yang mereka anggap sebagai "orang asing".[79]

Sisi yang lain, orang Islam lebih memperhatikan persoalan Islam sebagai agama dalam pengertian sempit (seperti perkawinan, hubungan keluarga, peraturan yang berkenaan dengan waris) sedangkan aspek politik dan sosial dari agama Islam kurang mendapat perhatian.[80] Akibatnya umat Islam mengalami kekalahan dan kemunduran. Di tambah lagi keterbatasan ilmu dan wawasan masyarakat, dimanfaatkan oleh Belanda secara khusus untuk melakukan "***de vide et amverre***" (politik pecah belah) dengan memperuncing perselisihan antara *belah* (marga) secara khilafiah, bid'ah dan khurafat. Pengaruhnya sampai saat ini masih ada.[81]

M. Yacob Ibrahim, dalam tulisannya "*Sejarah, Adat Istiadat dan Kebudayaan Gayo*", menyatakan bahwa peranan yang diberikan oleh penjajahan Belanda terhadap peradaban penduduk menghilangkan norma

---

[79]Deliar Noer, *Gerakan Modern Islam di Indonesia*, 1990-1942 (terj.) dari "The Modernist Muslim Movement in Indonesia 1900-1942. (Jakarta : LP3ES, PT. Djaya Pirusa, 1980), hlm. 183.

[80]Deliar Noer, *Gerakan, ibid.*, hlm. 183.

[81]H. Mahmud Ibrahim, *Mujahid, op.cit.*, hlm. 78.

hukum, agama, adat istiadat dan sosial yang dapat menimbulkan perlawanan dan atau yang dapat memperkecil pengaruh Belanda di kalangan penduduk.[82] Sebaliknya norma-norma yang dapat memperkuat pengaruh Belanda terus dibina dan dikembangkan,[83] seperti permusuhan antar suku (Belah), perjudian, mengisap candu, pencurian dan lain-lain.

Tingkat peradaban dan menghidupkan masyarakat selama penjajahan Belanda sangat rendah. Di bidang pendidikan dijalankan juga politik pendidikan pecah belah, menanamkan rasa rendah diri dan berjiwa pasif. Pada umumnya rakyat biasa kurang diberikan keleluasaan untuk memasuki dunia pendidikan, disamping kesadaran rakyat sendiri belum ada memasuki sekolah yang didirikan Belanda, karena mereka anggap "kafir" dan haram hukumnya. Lapangan kerja dalam bidang perkantoran yang memerlukan tenaga relatif terbuka, karena Belanda membuka proyek-proyek jalan, perkebunan dan perindustrian, maka rakyat biasa dijadikan sebagai buruh kasar, kuli dan lain-lain, akibatnya banyak masyarakat menderita dan meninggal.

Selain faktor negatif yang ditimbulkan penjajahan Belanda terhadap rakyat Gayo, ada juga faktor positifnya antara lain Belanda membuka jalan raya Bireune-Takengon dan jalan-jalan di daerah-daerah perkebunan milik Belanda. Belanda membuka perkebunan Damar (*Pinus Marcuise*) yang

---

[82]M. Yacob Ibrahim, Sejarah, "Adat Istiadat dan Kebudayaan Gayo" *Majalah Telangke*, Nomor : 5 Tahun 1/1996, (Medan : Diterbitkan oleh Keluarga Gayo Aceh Tengah (KGAT) Medan, 1996), hlm. 40.

[83]M. Yacob Ibrahim, *Sejarah, ibid.*, hlm. 40.

sangat luas arealnya, kebun kopi di Blanggele, Bergendal, Paya Tumpi, Bukit Menjangan, Gunung Tosari, Bius, Jamur Barat, Bandar Lampahan, Umang dan perkebunan teh di Redelong.

Tindakan penjajahan bukan hanya terhadap pisik, tetapi juga terhadap non pisik seperti dalam hal melakukan demokrasi atau musyawarah Belanda berusaha memasukkan ide-ide politik adu domba kepada masyarakat. Menurut Tengku H. Abdullah M, bahwa "*I masa penjajahen Belene kemurnien ni pendepet urang kampung* atau *Sarakopat gere lepas betul pedeh, turah mayowe kenak ni Belene a we Kowas, Ike betulpe pendepet ni Sarakopat ta pasti turah ilemahne we, kati enti we i kunahi*" artinya Di masa penjajahan Belanda kemurnian dari pendapat orang kampung atau *Sarakopat* tidak dapat diperoleh secara benar, tetapi harus masuk ide atau gagasan Belanda ke dalam hasil musyawarah tersebut. Kalaupun pendapat dari *Sarakopat* itu benar, Belanda pasti melemahkannya, agar mereka jangan diganggu".[84]

Selanjutnya Tengku H. Abdullah M, mengatakan bahwa "*Ike Beluh sesara jema ku Medan Perang mu lewen Belene, keta urang kampung gere ongot pelin, pakae atas ni pimpinen Sarakopat munengini rayat beik, tue, mude, kul kucak rawan, banan, beru bujang, beluh memungen ume ni si pejuangnga, ari mujelbang sampe kumungee ibueten*".[85] Artinya kalau ada

---

[84]Wawancara dengan Tengku H. Abdullah M, Tokoh Adat Gayo di Kampung Mongal Takengon, tanggal 20 Pebruari 2003.

[85]Wawancara dengan Tengku H. Abdullah, M. *ibid.*

seorang pergi ke Medan perang untuk melawan Belanda, maka orang kampung tidak tinggal diam, mereka atas pimpinan *Sarakopat* mengerahkan rakyat, baik yang tua, muda, besar, kecil, laki-laki dan perempuan, gadis dan lajang mengerjakan sawah para pejuang, dari mulai mencakul sawah sampai selesainya dikerjakan.

Selain itu, peran serta masyarakat Gayo dalam menghadapi perang dengan Belanda, *Sarakopat* memerintahkan kepada masyarakat agar membuat makanan sebagai bekal bagi para pejuang ke Medan perang,[86] hal ini sebagaimana yang diceritakan oleh *Ama* Usman Raliby kepada peneliti, bahwa "*i masa Belene kami bewenen bebujang i kumpulen ni Sarakopat i lah nibelang, munaranen undian beluh perang mulewen Belene, kebetulen kona amakul Ariusme Empun Kamat, kami sitaringni*

---

[86]Medan perang dimaksudkan adalah para pejuang Gayo melawan Belanda ke luar Daerah dengan melakukan perjalanan kaki dari Takengon ke Isaq, kemudian ke Belang Kejeren sampai ke Tanah Karo, Kebun Jahe Sumatera Timur. Perlawanan yang dilakukan oleh Rakyat Gayo dalam menghadapi penjajahan Belanda ini cukup besar dan gigih, sehingga beberapa kampung yang mempertahankan diri habis semua penghuninya. Pasukan-pasukan Belanda terus-menerus melakukan patroli, karena perlawanan secara gerilya dilancarkan dan berakhir pada tahun 1938. Panglima perang yang dikenal saat itu antara lain: Panglima Perang Amin, Panglima Perang Pang Piah, Bramat, Panglima Perang Pren, *Petue* Putih, *Petue* Leman, Penghulu Lot, Penghulu Pertik, Pang Dollah, Pang Latih, Raja Putih, Raja Kahar, Aman Gombang, Aman Gombang Amat Getia, Lahadin, Panglima Cik, Panglima Mat Saleh, Panglima Cik Tampong, Pang Ali Gayo, Pang Sali, Pang Mude, Pang Jalim, Pang Manap, Raja Cik Pasir, Panglima Geter, Ejem, Tengku Aman Sejuk, Tengku di Barat, Tengku Amat, Tengku Cot Batee, Tengko Gayo, Tengku *Imem* Lemot, *Imem* Penghulu Mungkur, *Imem* Pulo Tige, *Imem* Linge, Tengku Mude Pendeng, Tengku Mude Kute Sre, Tengku Mude Padang, Carno, Leube Grondong, Pang Akeb Samar Kilang, Pang Ramung, Aman Dimot dan lain-lain yang tidak tercatat. Lihat M. Yacob Ibrahim, *Sejarah, op.cit.*, hlm. 40. Panglima Aman Dimot wafat tanggal 30 bulan Juni 1949 dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kabanjahe. Lihat H. Mahmud Ibrahim, "Panglima Aman Dimot", *Majalah Telengke*,, Edisi 3 Tahun 1/Maret/1996 (Medan : Keluarga Gayo Aceh Tengah (KGAT) Medan, 1996), hlm. 23-24.

ikinni Sarakopat, isamping mubuet numee, kami munutu Temping, Gegaluh, kuwan ni Jingki, Gutel, Lepat kin nemah atau bekal ni para pejuang ku Medan Perang".[87] Artinya, dimasa penjajahan Belanda kami semua pemuda dikumpulkan oleh *Sarakopat* di tengah lapangan untuk mengadakan undian pergi berperang melawan Belanda, secara kebetulan undian tersebut jatuh kepada Bapak Ariusmu Empun Kamat. Kami yang tinggal diperintahkan oleh *Sarakopat*, disamping mengerjakan sawah, kami membuat makanan, seperti *Temping, Gegaluh, Gutel, Lepat* (makanan khas Gayo) untuk bekal makanan bagi para pejuang di Medan Perang".

Berdasarkan keterangan dari tokoh *petue* (petua) di atas, menunjukkan bahwa lembaga *Sarakopat* masih tetap berperan dalam memimpin dan mengatur rakyatnya untuk melawan penjajahan kolonial Belanda. Bahkan para pemimpin *Sarakopat* banyak yang turut serta melawan Belanda, hal itu dapat dibuktikan bahwa banyak tokoh *Sarakopat* menjadi panglima perang, sebagaimana telah dijelaskan dalam kutipan ke 86 penelitian ini.

Lebih dari itu, *Sarakopat* dan orang Gayo juga berperan aktif berinfak dan menyisihkan zakat bagian *fī sabīlillāh*, menjual ternak dan padi, uangnya diserahkan kepada utusan Sultan untuk biaya perang Aceh.[88] Kadang-kadang masih dilakukan pengutipan untuk tujuan tersebut,

---

[87]Wawancara dengan *Ama* (Ayahanda) Usman Raliby, *op.cit.*
[88]H. Mahmud Ibrahim, *Mujahid*, *op.cit.*, hlm. 59.

karena orang Gayo mengerti arti bantuan dana perang sampai-sampai yang miskinpun berusaha menyedekahkan hartanya walaupun sedikit.[89]

4. Zaman Penjajahan Jepang (1942-1945)

Jepang berkuasa di Tanah Gayo Aceh Tengah selama 3 setengah tahun (1942-1945) dalam rangka ***Dai Toa Sunco*** (peperangan Asia Timur Raya).[90] Pada masa pendudukan Belanda, lembaga *Sarakopat* masih tetap ada, namun kurang berperan dalam mengatur dan memimpin rakyat Gayo, karena kekuasaan berada di tangan Belanda. Sedangkan pada masa pendudukan Jepang, lembaga *Sarakopat* masih tetap ada, namun sama sekali tidak memiliki fungsi apa-apa lagi dalam kehidupan masyarakat, sebagaimana M.J. Melalatoa dalam bukunya "*Kebudayaan Gayo*" menuliskan bahwa kedatangan kekuasaan Jepang menyebabkan tak berfungsinya lembaga *Sarakopat*.[91]

Ada beberapa faktor yang menyebabkan lembaga *Sarakopat* tidak berfungsi pada zaman pendudukan Jepang. Di antaranya adalah :

1. Perlakuan penjajahan Jepang sangat keras dan kejam terhadap rakyat Gayo, mereka disuruh kerja paksa, sehingga penderitaan rakyat Gayo berkepanjangan dan selalu berada dalam ketakutan. Terutama pertengahan tahun 1943 merupakan awal dari penderitaan rakyat Gayo

---

[89]Aman Asnah, Gayo, op.cit., hlm. 72.
[90]H. Mahmud Ibrahim, *Mujahid*, *op.cit.*, hlm. 81.
[91]M. J. Melalatoa, *Kebudayaan*, *op.cit.*, hlm. 125.

Aceh Tengah yang sukar dilupakan, karena belum pernah mengalami sejak suku bangsa ini berada di dataran tinggi Gayo.[92]

2. Pada masa Jepang para tokoh *Sarakopat* diberikan jatah, baik berupa uang, beras maupun pakaian, supaya *Sarakopat* setia dan patuh kepada kolonial Jepang, sementara kekuasaan untuk membela rakyat yang menderita tidak ada sedikitpun peluang yang diberikan Jepang kepada *Sarakopat.*[93] Dengan kata lain lembaga *Sarakopat* tidak memiliki kekuasaan sedikitpun dalam mengatur dan mengurusi segala kepentingan masyarakat.
3. Penjajahan Jepang berusaha memisahkan antara tokoh pimpinan *Sarakopat* dengan rakyatnya, atau menjauhkan rakyat dari sistem Politik *Sarakopat*, sehingga rakyat Gayo merasa tidak puas dalam bentuk keluhan, seakan-akan mereka kehilangan tempat berpegang, bahkan mereka tidak punya tempat untuk mengadu dan bersandar, seperti yang terdengar dalam ungkapan yang hidup dalam masyarakat Gayo ini: "***Seren ku Kayu, kayu pe murebah. Seren ku atu, atupe mupecah***, "artinya: Bersandar kebatang kayu, kayupun rebah, bersandar kebatu, batupun pecah.

Akibat tidak berfungsinya kepemimpinan lembaga *Sarakopat* dalam mengurusi kepentingan masyarakat, maka rakyat Gayo selalu berada dalam penderitaan dan kerja paksa yang berlangsung terus menerus sampai

---

[92]H. Mahmud Ibrahim, *Mujahid, op.cit.*, hlm. 81.
[93]Wawancara dengan Tengku H. Abdullah, M., *op.cit.*

dengan menjelang Kemerdekaan Indonesia yang diproklamirkan oleh Soekarno dan Hatta pada hari Jum'at bulan Ramadan 17 Agustus 1945. Kata hardik, "***bagiro naa***" dan "***pukur bagus dayo***", merupakan ungkapan keseharian untuk melampiaskan kemarahan tentara Jepang terhadap rakyat Gayo.

Kerja paksa yang dilakukan oleh kolonialisme[94] Jepang terhadap rakyat Gayo adalah membangun jalan baru di Gelampang, Waq, Lumut, Ise-ise, Tembolon jurusan Takengon-Blangkejeren, Genting Gerbang, Pelang dan Pamar jurusan Angkup-Gempang. Kerja paksa ini bukan hanya para pemuda, pelajar, bahkan orang tua sampai berusia 50 tahun pun terlibat di dalamnya. Padahal kerja paksa itu dilakukan semata-mata untuk kepentingan pertahanan kolonial Jepang sendiri.

Perlakuan Jepang terhadap Gayo yang sangat menyakitkan hati adalah para pekerja paksa tidak diberi makanan dan minuman, obat-obatan, pakaian, dan kebutuhan lainnya. Rakyat dipaksa menggali lereng dan memotong gunung, membawa batu dan tanah dari lembah keatas pematang, menebang pohon kayu besar yang tumbuh di lereng terjal; atau curam, sehingga banyak di antara mereka menderita sakit dan meninggal.[95]

---

[94]Kolonialisme dalam arti klasiknya adalah keadaan, dimana satu daerah dikuasai oleh orang-orang bukan pribumi, dan mereka itu berasal dari daerah di luar dari wilayah pribumi-pribumi itu, sehingga yang benar-benar berkuasa di daerah itu adalah orang asing yang masuk dalam derah itu. Atau kolonialisme yang diciptakan oleh satu bangsa yang merasa perlu mencari tanah luas baru, karena di dalam negerinya sendiri kurang ada kesempatan buat berkembang dan juga mencari untung lebih banyak dalam hidup sehari-hari dan buat ini mengerjakan atau mengeksploitir sumber-sumber daerah-daerah baru. Lihat Abu Hanifah, "Kolonialisme dan Neo Kolonialisme Belum Mati", dalam *Majalah Kiblat*, Nomor : 9/XXIII 20 September 1975, (Jakarta : Yayasan Perjalanan Haji Indonesia, 1975), hlm. 9.

[95]H. Mahmud Ibrahim, *Mujahid, op.cit.*, hlm. 84.

Kondisi pendidikan rakyat Gayo pada masa pendudukan Jepang semakin merosot, baik kualitas maupun kwantitasnya. Para guru lebih banyak diperintahkan untuk mengajar bahasa dan kebiasaan orang-orang Jepang, serta melatih pelajar mengenai cara berperang. Sedangkan kondisi perekonomian rakyat Gayo sangat merosot, rakyat harus makan nasi jagung, ubi-ubian sebagai makanan pokok sehari-hari. Sedangkan pakaian terbuat dari Goni atau *nanit* (sejenis kulit kayu), yang jelas kondisi rakyat Gayo sangat memprihatinkan ketika Jepang berkuasa di Tanah Gayo.

Nilai dan martabat orang Gayo di mata Jepang, sama halnya dengan binatang, bahkan lebih bernilai binatang daripada orang Gayo sendiri. Salah satu fakta sejarah menunjukkan bahwa tantara Jepang sering memperkosa anak-anak gadis di daerah ini. Pada sore harinya mereka pergi berjalan-jalan di atas motor jeep, sambil melemparkan uang logam ke dalam parit dan rumput lebat, oleh masyarakat yang kondisi ekonominya sangat merosot berdatangan untuk merebut uang yang dilemparkan tentara Jepang ke dalam parit dan rumput yang lebat, baik laki-laki, maupun perempuan, tua dan muda, semuanya berebutan, sehingga terjadi perkelahian dan pembunuhan, sementara Jepang tertawa melihat tontonan yang sangat menarik baginya, padahal uang yang mereka peroleh berasal dari bumi Gayo dan tenaga rakyat yang diperlakukan secara paksa.[96]

---

[96]Wawancara dengan H. Abdullah M, *op.cit.*

5. Zaman Kemerdekaan RI (1945-1998)

Akibat pengaruh negatif yang ditimbulkan oleh penjajahan Belanda (1901-1942), menyusul kedatangan Jepang (1942-1945), adat/budaya Gayo, khususnya lembaga *Sarakopat*nya belum dibenahi sampai akhir tahun 1969, hal itu barangkali pada masa ORLA (Orde lama) atau kabinet "Demokarasi terpimpin" masyarakat Gayo juga menjadi bahan rebutan kekuatan sosial politik, dimana masyarakat menjadi bingung untuk menentukan mana yang benar dan mana yang salah.

Salah satu contoh misalnya, masyarakat Gayo menjadi kebingungan karena mereka dihadapkan kepada dua pilihan sebagai dilema. Pilihan pertama turut mendukung Kemerdekaan Republik Indonesia (1945), di bawah kekuasaan demokrasi terpimpin yaitu Presiden Soekarno, dan pilihan kedua, bahwa dimasa Orde Lama ini muncul Gerakan DI/TII di Aceh,[97] apakah masyarakat Gayo turut bergabung dengan gerakan tersebut. Keadaan seperti itu membawa masyarakat Gayo semakin susah, baik dari segi perekonomian, pendidikan maupun perpolitikan.

---

[97]Gerakan DI/TII (Darul Islam/Tentara Islam Indonesia), merupakan "Gerakan amanah" untuk mengingatkan penguasa agar tidak bertindak sewenang-wenang dan melupakan sumbangan daerah ini di masa lalu. Gerakan itu muncul karena adanya ketimpangan pendapatan daerah dengan pusat di bawah rejim Orde Lama. Persoalannya adalah dari empat industri besar yang ada sejak ditemukannya ladang minyak di Arun, setiap tahun sedikitnya diperoleh pendapatan (defisa) Rp. 31 triliun, sementara APBD Propinsi Aceh sebesar Rp. 150 miliar setiap tahun, berarti tidak sampai satu persenpun hasil bumi Aceh itu dikembalikan ke daerah asalnya, akibatnya muncul gerakan ini untuk menentang ketimpangan itu kepada *rejem* Orde Lama. Lihat Al-Chaidar, at.al, *Aceh Bersimbah Darah, Mengungkap Penerapan Status Daerah Operasi Militer (DOM) di Aceh 1989-1998*, (Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 1998), hlm. xviii.

Sebetulnya masyarakat Gayo sejak tahun 1912 sudah banyak terlibat dalam kancah gerakan perpolitikan praktis di Indonesia, khususnya para pemimpin lembaga *Sarakopat* seperti *reje, imem, petue* dan tokoh politik lainnya, dengan mendirikan pesantren-pesantren untuk menanamkan kebencian terhadap penjajahan Belanda dan Jepang. Kemudian pada tahun 1925 oleh kalangan pemuda terpelajar melakukan protes-protes, baik melalui surat kabar di Medan maupun secara langsung menentang kekuasaan Belanda dan Jepang.

Gerakan-gerakan politik itu, dilanjutkan dengan timbulnya organisasi-organisasi modern seperti, organisasi Muhammadiyah di Yogyakarta (1912), Persatuan Islam (PERSIS) di Bandung (1920-an), Nahdatul Ulama (NU) di Surabaya (1926) dan Persatuan Tarbiyah Islamiyah (PERTI) di Candung, Bukit Tinggi (1930),[98] dan partai-partai politik, seperti Sarikat Islam (SI) yang merupakan kelanjutan dari SDI, Persatuan Muslimin Indonesia (PERMI) di Padang Panjang (1932) yang merupakan kelanjutan dan perluasan dari organisasi pendidikan Thawalib dan Partai Islam Indonesia (PII) pada tahun 1938.[99]

Bahkan pada awal Kemerdekaan Republik Indonesia muncul kembali partai-partai Politik yang sebelumnya bertikai, seperti, Masyumi (Majelis Syuro Muslimin Indonesia) didirikan pada tanggal 7 November

---

[98]Badri Yatim, *Sejarah Peradaban Islam*, (Jakarta : Diterbitkan dalam rangka kerjasama dengan lembaga Studi dan Kemasyarakatan (LSIK), PT. Raja Grafindo Persada, ed. 1 Cet. 6, 1997), hlm. 258.

[99]Badri Yatim, *Sejarah, ibid.*

1945 di Yogyakarta, partai sosialis yang mengkristalisasikan falsafah hidup Markisme berdiri pada tanggal 17 Desember 1945, dan Partai Nasional Indonesia (PNI) berdiri pada tanggal 29 Januari 1946, yang mewadahi cara hidup nasionalis "sekuler".[100]

Kemudian pada hasil pemilihan umum pertama tahun 1955 muncul empat partai besar, yaitu Partai Nasional Indonesia (PNI) dengan jumlah suara 8,5% (22,3%), Masjumi dengan 8 juta suara (20,9%), Nahdatul Ulama (NU) dengan 7 juta suara (18,4%) dan partai Komunis Indonesia (PKI) dengan 6,1 juta suara (16,4%).[101] Keempat partai itu berturut-turut memperoleh 57,45 dan 39 kursi di Parlemen yang terdiri dari 257 orang anggota.[102]

Semua partai atau organisasi di atas, baik Partai Politik (ORPOL) maupun Organisasi Sosial (ORMAS) mengalami perkembangan sampai keseluruh pelosok bumi Nusantara ini, termasuk ke daerah dataran tinggi Tanah Gayo Aceh Tengah, dengan demikian organisasi-organisasi tersebut jugalah yang telah banyak mempengaruhi pola pemikiran politik masyarakat Gayo, terutama bagi perangkat pemerintahan *Sarakopat* di Tanah Gayo.

Salah satu organisasi sosial yang banyak pengikutnya di Tanah Gayo adalah Organisasi Muhammadiyah Takengon, sejak tahun 1960-an telah banyak berkiprah dalam membentuk pola berpikir umat Islam, walaupun sistem

---

[100]Abdul Sani, *Lintasan Sejarah Pemikiran Perkembangan Modern Dalam Islam*, (Jakarta ; PT. Raja Grafindo Persada, Ed. 1, Cet. 1, 1998), hlm. 227.

[101]Deliar Noer, *Gerakan, op.cit.*, hlm. 6.

[102]Deliar Noer, *Gerakan, ibid.*

kepengurusannya belum menyentuh bidang pendidikan, tetapi pengalaman keagamaan yang bersifat ritual semakin semarak dilakukan oleh masyarakat Gayo. Apalagi pada pertengahan tahun 1966, Tengku H. Mohd Ali Djadun (1927) terpilih sebagai Ketua Umum Daerah Muhammadiyah Tingkat II Kabupaten Aceh Tengah, banyak lembaga pendidikan yang beliau dirikan mulai dari Sekolah Taman Kanak-Kanak (TK) sampai Perguruan Tinggi.[103]

Selain organisasi Muhammadiyah adalah Nahdatul Ulama (NU) juga memiliki anggota yang banyak semasa kepengurusan Tengku H. Arifin Hasan (1928-1999). Kedua organisasi ini yaitu Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama (NU) pada masa itu cukup andal dan efektif untuk menggerakkan dan mengarahkan kekuatan-kekuatan sosio-kultural masyarakat Gayo.

Demikian juga partai-partai politik seperti: Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi), Partai Nasional Indonesia (PNI) cukup reaktif mempengaruhi massa. Bahkan Partai Komunisme Indonesia (PKI) pun cukup andal dalam merekrut masyarakat Gayo pada saat itu, bagi

---

[103]Selama 30 tahun 3 bulan atau dari tahun 1966 sampai tahun 2000 Tengku H. Mohd. Ali Djadun terpilih sebagai Ketua Umum Daerah Muhammadiyah Tingkat II Kabupaten Aceh Tengah. Beliau telah banyak mendirikan sekolah mulai dari Sekolah Taman Kanak-Kanak (TK) sampai Perguruan Tinggi, yaitu TK Merah Mege di Desa Asir-Asir. TK Bale Atu Takengon, TK Kute Kering, TK Paya *Reje* Tamidelem, TK Aisyiyah Bustanul Atfal Gunung Bukit Kebayakan. Untuk Tingkat SLTP yaitu SMP Bale Atu, SMP Muhammadiyah Cabang Teritit. Untuk Tingkat SMU yaitu, SMA Muhammadiyah yang didirikan pada tahun 1968 di Bale Atu Takengon, kemudian tahun 1986 dipindahkan ke Desa Gunung Bukit Mampak Kebayakan, dan untuk Tingkat Perguruan Tinggi. Beliau mendirikan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Muhammadiyah Aceh Tengah (STIHMAT) yang baru mewisuda alumni pertama pada tanggal 27 Pebruari 2001. Lihat Azharia, 77 Tahun Sirah Tgk. H. Mohd. Ali Djadun di Negeri Antara Tanah Gayo Kabupaten Aceh Tengah, (Bandung : Ciptapustaka Media, Cet 1, 2002), hlm. 69-70.

masyarakat Gayo yang tidak mengerti percaturan politik, akibat tidak berpendidikan, tidak tahu menulis dan membaca, banyak yang terjebak masuk ke dalam Partai Komunisme Indonesia (PKI), karena istilah Partai Komunisme Indonesia (PKI) sering diistilahkan bermacam-macam di kalangan masyarakat Gayo pada saat itu, di antaranya adalah "***Partai Ketoprak Isaq***", dan lain-lain, yang pada akhirnya umat Islam bersama ABRI dan golongan lainnya bekerjasama menumpas gerakan itu.[104]

Dengan adanya organisasi sosial dan partai-partai politik tersebut telah membuka kesadaran berpikir masyarakat Gayo, baik dalam bidang pendidikan, sosial kemasyarakatan, maupun dalam bidang sosial politik dan ekonomi. Kesadaran tersebut membawa masyarakat Gayo merindukan kembali lembaga *Sarakopat*nya yang telah pernah jaya, mantap dan berakar dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat pada masa yang lalu, yaitu masa Kerajaan Linge, Bukit, Cik Bebesen dan Syiah Utama pada abad V H/XI M sampai abad ke X H/XVI M.[105]

Ternyata pada akhir tahun 1968 kesadaran masyarakat Gayo telah diwujudkan dengan membentuk lembaga *Sarakopat*nya yang diprioritaskan pada upaya mewujudkan dan memelihara stabilitas dan pembenahan adat istiadat/budaya Gayo, serta sistem pemerintahan *Sarakopat*, maka sejak tanggal 1 April 1969, saat dimulai pelaksanaan Repelita Pertama Orde

---

[104]Badri Yatim, *Sejarah, op.cit.*, hlm. 270.

[105]H. Mahmud Ibrahim, *Peranan, op.cit.*, hlm. 30. Lihat juga M. J. Melalatoa, *Kebudayaan, op.cit.*, hlm. 126.

Baru (ORBA), adat istiadat/budaya Gayo mulai digali dan dikembangkan serta diaplikasikan dalam kehidupan masyarakat Gayo melalui program sub sektor dari sektor budaya bidang pembangunan agama dan sosial budaya.[106]

Dalam upaya menggali dan mengembangkan adat istiadat /budaya serta sistem pemerintahan *Sarakopat*, umat Islam di Tanah Gayo dihadapkan kembali kepada kancah politik Orde Baru. Pada awal tahun 1970-an Orde Baru telah membangun lembaga kepresidenan menjadi institusi politik yang paling berkuasa di negeri ini, yaitu Golkar, hal ini dapat dilihat dari data tahun 1970, kekuatan sosial politik yang paling besar adalah Golkar (72%) kemudian menyusul Parmusi (11,55%) NU (Nahdatul Ulama) (9,68%), PSII (Partai Syarikat Islam Indonesia) (5,7%), sedangkan gabungan dari ketiga partai PERTI, PNI, IP-KI (1,07%).[107]

Pada perkembangan berikutnya pemerintahan Orde Baru, mengelompokkan fraksi-fraksi Parpol di DPR hanya tiga partai saja yaitu Partai Golkar, PPP dan PDI, maka pada tanggal 14 Agustus 1975 RUU kepartaian disahkan. Penataan kehidupan kepartaian berikutnya adalah penetapan azas tunggal Pancasila untuk semua Parpol, Golkar, dan organisasi lainnya tidak ada asas ciri, tidak ada lagi ideologi Islam, dan oleh karena itu tidak ada lagi partai Islam. Partai Islam digabung menjadi

---

[106]H. Mahmud Ibrahim, *Peranan*, *op.cit.*, hlm. 30.
[107]M.J. Melalatoa, *Kebudayaan*, *op.cit.*, hlm. 127.

satu partai yaitu PPP.[108]

Namun kendatipun tidak ada lagi partai-partai Islam, kegiatan Islam semakin berkembang bila dibanding dengan waktu-waktu sebelumnya. Terlihat, ada tanda-tanda kebangkitan Islam kembali dalam masa Orde Baru. Fenomena-fenome yang bisa dilihat adalah muculnya bangunan-bangunan baru Islam; mesjid-mesjid, mushalla-mushalla, madrasah-madrasah, juga pesantren-pesantren, diikuti pula dengan semakin ramainya jamaah salat, pengajian agama, baik dalam lingkungan departemen-departemen, juga Perguruan Tinggi dan lain-lainnya.[109]

Indikasi di atas, menunjukkan adanya peluang besar bagi perkembangan umat Islam di Indonesia, khusunya umat Islam di Tanah Gayo dalam upaya mewujudkan nilai-nilai ajaran Islam dan adat/budaya Gayo dipandang sebagai salah satu unsur budaya bangsa, mengandung nilai-nilai luhur bangsa, harus terus dipelihara, dibina dan dikembangkan guna memperkuat penghayatan dan pengamalan Pancasila sebagaimana tercantum pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, untuk dihayati dan diamalkan sesuai dengan ketetapan MPR-RI Nomor II/MPR/1978.[110]

Berdasarkan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan ketetapan MPR-RI Nomor II/MPR/1978 itulah pemerintah daerah

---

[108]Baca Yusril Ihza, dalam Panjimas No. 284, dan dalam Badri Yatim, *Sejarah, op.cit.*, hlm. 270. Lihat juga Luthfi Aunie, "Transformasi Politik dan Ekonomi Kerajaan Islam Aceh (1641-1699)" dalam *Pranata Islam di Indonesia, Pergulatan Sosial, Politik, Hukum, dan Pendidikan*, (Jakarta : Logos Wacana Ilmu, Cet. 1, 2002), hlm. 201.

[109]Badri Yatim, *Sejarah, op.cit.*, hlm. 272.

[110]Undang-udang Dasar 1945/Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila Ketetapan MPR No. 11/MPR/1978, (Jakarta : BP-7 Pusat, 1990), hlm. 109.

Kabupaten Aceh Tengah menempuh suatu kebijaksanaan untuk membentuk lembaga adat *Sarakopat* di Tanah Gayo, sebagai salah satu upaya menjaga harkat dan martabat adat dan masyarakat Gayo sebagai bangsa yang mencerminkan nilai-nilai luhur bangsa, meningkatkan kualitas hidup, memperkuat kepribadian bangsa, mempertebal rasa harga diri dan kebangsaan Nasional, memperkokoh jiwa persatuan dan kesatuan bangsa serta mampu menjadi penggerak bagi perwujudan cita-cita bangsa di masa depan.

Sehubungan dengan itulah, pemerintah daerah Kabupaten Aceh Tengah, memberi peluang bagi masyarakat Gayo secara luas untuk berperan aktif dalam proses pengembangan dan pelaksaaan adat/budaya Gayo. Maka untuk meningkatkan pelayanan kepentingan masyarakat Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Tengah pada tahun 1992 telah membentuk lembaga *Sarakopat* secara berjenjang, yaitu *Sarakopat* Kabupaten, Kecamatan, dan Kampung.

Menurut Drs. Tengku H. Mahmud Ibrahim dan A.R. Hakim Aman Pinan dalam buku mereka "*Syari'at Dan Adat Istiadat* " Menuliskan bahwa:[111]

Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Aceh Tengah, tanggal 15 Maret 1992 Nomor: 045/12/SK/92 tentang Lembaga Adat Gayo

---

[111]H. Mahmud Ibrahim, et.al., *Syari'at, op.cit.*, hlm. 126-127. Lihat juga, A.R. Hakim Aman Pinan, "*Budaya Gayo Menghadapi Perubahan Global*, (Menanam Kembali Akar Budaya Yang Tercabut) " (Medan : *Makalah* Disampaikan pada dialog dan silaturrahmi Keluarga Gayo Aceh Tengah (KGAT), 1997), hlm. 7.

di Kabupaten Aceh Tengah telah ditetapkan Susunan *Sarakopat* sebagaimana tercantum dalam pasal 4, 5, 6, dan 8 sebagai berikut:

PASAL 4

Sarakopat pada Tingkat Daerah, Kecamatan dan Desa/Kelurahan

PASAL 5

Sarakopat terdiri dari:

1. Bupati kepala Daerah selaku *Reje*;
2. Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Aceh Tengah (Sekarang Majelis Permusyawaratan Ulama) Selaku, *Imem*;
3. Ketua Lembaga Adat dan Kebudayaan(Laka) Cabang Aceh Tengah Selaku *Petue*;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten DaerahTingkat II Aceh Tengah selalu Rakyat (*Genap Mufakat*).

PASAL 6

Sarakopat Kecamatan terdiri dari:

1. Camat selaku *Reje*;
2. Ketua Majelis Ulama Indonesia Kecamatan Selaku *Imem*;
3. Ketua Lembaga Adat dan Kebudayaan Kecamatan Selaku *Petue*;
4. Pimpinan masyarakat kecamatan selaku rakyat (*Genap Mufakat*).

PASAL 8

1. Serakopat Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Pengurus Pusat Lembaga Adat dan Kebudayaan Aceh Propinsi Daerah Istimewa Aceh.
2. *Sarakopat* Kecamatan, Desa / Kelurahan diangkat dan diberhentikan oleh Pengurus Lembaga Adat dan Kebudayaan Aceh Cabang Aceh

di Kabupaten Aceh Tengah telah ditetapkan Susunan *Sarakopat* sebagaimana tercantum dalam pasal 4, 5, 6, dan 8 sebagai berikut:

PASAL 4

Sarakopat pada Tingkat Daerah, Kecamatan dan Desa/Kelurahan

PASAL 5

Sarakopat terdiri dari:

1. Bupati kepala Daerah selaku *Reje*;
2. Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Aceh Tengah (Sekarang Majelis Permusyawaratan Ulama) Selaku, *Imem*;
3. Ketua Lembaga Adat dan Kebudayaan(Laka) Cabang Aceh Tengah Selaku *Petue*;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten DaerahTingkat II Aceh Tengah selalu Rakyat (*Genap Mufakat*).

PASAL 6

Sarakopat Kecamatan terdiri dari:

1. Camat selaku *Reje*;
2. Ketua Majelis Ulama Indonesia Kecamatan Selaku *Imem*;
3. Ketua Lembaga Adat dan Kebudayaan Kecamatan Selaku *Petue*;
4. Pimpinan masyarakat kecamatan selaku rakyat (*Genap Mufakat*).

PASAL 8

1. Serakopat Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Pengurus Pusat Lembaga Adat dan Kebudayaan Aceh Propinsi Daerah Istimewa Aceh.
2. *Sarakopat* Kecamatan, Desa / Kelurahan diangkat dan diberhentikan oleh Pengurus Lembaga Adat dan Kebudayaan Aceh Cabang Aceh

politik yang sudah sangat kadaluwarsa, yang diwariskan oleh Orde Baru.[113]

Ternyata setelah Presiden Soeharto lengser dari tampuk kepresidenan, digantikan oleh Prof. Dr. H. B.J. Habibie sebagai Presiden Republik Indonesia ke III masih banyak tokoh politik Orde Baru yang menjadi pejabat dan anggota Kabinet Orde Reformasi. Namun yang menjadi persoalan adalah semasa B. J. Habibie menjadi presiden telah memberikan peluang terhadap rakyat Indonesia membuat partai politik sebanyak-banyaknya, bahkan memiliki hak bebas mengeluarkan pendapat bagi rakyat.

Karena didorong oleh adanya kebebasan mendirikan partai politik dan kebebasan hak mengeluarkan pendapat, maka timbul sebanyak 48 partai politik di Indonesia, yaitu Partai Indonesia Baru (PIB), Partai Kristen Nasional Indonesia (PKNI), PNI-Supeni, Partai Aliansi Demokrasi Indonesia (PADI), Partai Kebangkitan Muslim Indonesia (PKMI), Partai Umat Islam (PUI), Partai Kebangkitan Ummat (PKU), Partai Masyumi Baru, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII), PDI Perjuangan, Partai Abul Yatama, Partai Kebangkitan Merdeka, Partai Demokrasi Kasih Bangsa (PDKB), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Rakyat Demokratik (PRD), Partai Syarikat Islam Indonesia 1905, Partai Katolik Demokrat, Partai Pilihan Rakyat (Pilar), Partai Rakyat Indonesia (PARI), Partai Politik Islam Indonesia Masyumi, Partai Bulan

---

[113] *Ibid.*, hlm. 343.

Bintang (PBB), Partai Solidaritas Pekerja, Partai Keadilan, Partai Nahdatul Ulama, PNI Ficul Marhainis, Partai Penerus Kemerdekaan Indonesia, Partai Republik, Partai Islam Demokrat, PNI-Masa Marhaen, Partai Musyawarah Rakyat Banyak (MURBA), Partai Demokrasi Indonesia (PDI), Partai Golkar, Partai Persatuan (PP), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Uni Demokrasi Indonesia (PUDI), Partai Buruh Nasional, Partai MKGR, Partai Daulat Rakyat (PDR), Partai Cinta Damai, Partai Keadilan dan Persatuan (PKP), Partai Solidaritas Pekerja Seluruh Indonesia, Partai Nasional Bangsa Indonesia, Partai Bhinneka Tunggal Ika Indonesia, Partai Solidaritas Uni Nasional Indonesia (SUNI), Partai Nasional Demokrat, Partai Ummat Islam Indonesia, dan Partai Pekerja Indonesia (PPI).

Semua Partai Politik (PARPOL) di atas telah mempengaruhi pola pemikiran rakyat Indonesia, termasuk pola pemikiran masyarakat Gayo di Aceh Tengah. Hal ini dapat dibuktikan dari hasil Pemilihan Umum 1998 (periode 1998-2003), terdapat sebanyak 11 Partai Politik yang duduk sebagai anggota DPRD Aceh Tengah. Kekuatan politik yang paling besar adalah PPP (Partai Pesatuan Pembangunan) (33,4%), PDIP (18,5%), Golkar (14,8%), PAN (11,1%), sedangkan PKP, PBB, PNU, PK, PKB dan PUI masing-masing memperoleh (3,7%).[114]

Berdasarkan keterangan di atas, menunjukkan bahwa umat Islam di Tanah Gayo-pun tidak bisa terlepas dari percaturan politik Orde Reformasi hingga sekarang, bahkan akan datang. Dengan demikian kata

---

[114]Aceh Tengah Dalam Angka, 2000, *op.cit.*, hlm. 15-18.

K.H. Abdurrahman Wahid, "Orang Islam sebenarnya juga tidak bisa menghindar dari politik. Kalau menghindar sama saja dengan tidak mengerti perkembangan keadaan."[115] Karena *set-up* Orde Reformasi memang sudah demikian.

Dalam sistem Politik *Sarakopat*, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Aceh Tengah merupakan salah satu perangkat pemerintahan *Sarakopat*, dan dari data hasil pemilihan umum tahun 1998 di atas, adalah berkat adanya partisipasi umum dari keseluruhan masyarakat Gayo Aceh Tengah. Karena pada hakekatnya, kedaulatan rakyat adalah inti daripada partisipasi umum rakyat dalam kehidupan bernegara.[116] Dan adanya kesempatan melakukan partisipasi umum secara efektif adalah wujud sebenarnya dari kebebasan dan kemerdekaan.[117]

Karena didorong oleh rasa kebebasan dan kemerdekaan rakyat Indonesia menuntut adanya reformasi di segala bidang, yang pada gilirannya daerah Nanggroe Aceh Darussalam menuntut adanya otonomi yang lebih besar, agar rakyat Aceh bisa lebih leluasa dalam menjalankan adat / budaya, agama serta pendidikan mereka, yang pada gilirannya pada tahun 2001 Presiden Republik Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

---

[115]K.H. Abdurrahman Wahid, *Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama : Reorientasi Wawasan Sosial, Politik*", dalam Yunahar Ilyas, et.al, (Ed). *op.cit.*, hlm. 92.

[116]Nurcholis Madjid, *Cita-cita Politik Islam Era Reformasi*, (Jakarta : Paramadina, Cetakan 1, 1999), hlm. 196.

[117]*Ibid.*

Demikian juga Aceh Tengah, yang didiami oleh orang Gayo (yang secara kultural agak berbeda dari Aceh, tetap menghayati kesadaran sejarah yang sama)[118] dengan Aceh. Setidak-tidaknya Aceh Tengah merupakan bahagian dari Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, yaitu satu wilayah dan satu politis. Dengan kata lain Aceh Tengah disamping mempunyai hak dan kewajiban berdasarkan Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah, juga berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Jadi Undang-Undang Nomor 18 tahun 2001 menempatkan titik berat otonomi khusus pada provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang pelaksanaannya diletakkan pada daerah Kabupaten dan Kota atau Nama lain secara proporsional.[119] Salah satunya darah Kabupaten Aceh Tengah.

Kabupaten Aceh Tengah sebagai pelaksana Undang-Undang Nomor 18 tahun 2001, telah membuat himpunan Qanun Kabupaten Aceh Tengah. Salah satu di antaranya adalah Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 9 tahun 2002 tentang Hukum adat Gayo. Dalam Qanun tersebut dinyatakan bahwa "Hukum Adat Gayo" merupakan nilai-nilai norma sosial budaya yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Gayo Aceh

---

[118]Lihat Mukhlis, "*Gayo : Kelanjutan Tradisi Dalam Perubahan Social*", (Ujung Pandang : Disertasi, Universitas Hasanuddin, 1983) dalam Taufiq Abdullah, *Islam dan Masyarakat, Pantulan Sejarah Indonesia*, (Jakarta : LP3ES, 1987, Cet. 1), hlm. 162.

[119]Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus bagi Propinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, 2001, hlm. 4.

Tengah, karena perlu dikembangkan dalam tatanan sosial kehidupan masyarakat. Hukum adat tersebut dijadikan sebagai pegangan dan pedoman kehidupan masyarakat Gayo.

Dalam Bab III lembaga adat Gayo pasal 5 ayat 1 sampai 4 Qanun tersebut, juga dinyatakan bahwa lembaga-lembaga adat sebagai pelaksana dalam penyelenggara Hukum Adat, juga sebagai alat kontrol keamanan, ketentraman, kerukunan, dan ketertiban masyarakat. Bahkan dalam Bab IV *Sarakopat* pasal 7 dan 8 Qanun tersebut secara tegas menyatakan bahwa *Sarakopat* berkedudukan sebagai wadah aparatur pemerintah *Gelong Preje*, Kecamatan, pemerintahan kampung sebagai wadah bermusyawarah / mupakat yang terdiri dari *Reje, Imem, Petue* dan *Rayat Genep Mupakat.*